



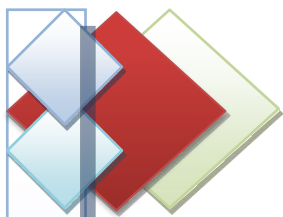
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Renstra 2021-2026



JALAN : SETIA BUDI NO. 9 PALU, TELP. 0451- 421090, 0451421490,- 421190 Faxmile (0451) 428490 PALU



KATA PENGANTAR

Dencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional, **Undang-undang No. 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) serta **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016**, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016- 2021. Dengan mengacu pada Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai selama periode 2021-2026, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan saat ini guna mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dengan menjamin keterserapan lulusan di dunia kerja serta mampu meningkatkan

kemampuan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan harapan dalam visi RPJMD 2016-2021. Selain itu perhatian yang lebih besar akan diberikan pada peningkatan mutu pendidikan, terutama pada mutu dan kualitas guru, penyediaan sarana laboratorium yang mencukupi, peningkatan mutu lulusan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, pemantapan pelaksanaan kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dengan pelayanan terhadap kelompok marginal di daerah 3T, Sehingga Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Penyusunan Rencana/Program Pembangunan dimasing-masing Bidang/UPTD dan sekaligus sebagai pedoman penyusunan laporan tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Perubahan ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergitas dan berkesinambungan. Semoga apa yang disajikan dalam Rencana Strategis Perubahan ini dapat memberikan tuntunan, manfaat didalam rangka pembangunan pendidikan dimasa mendatang untuk **meciptakan Sumberdaya Manusia Mandiri Yang Berdaya Saing. AMIEN....!**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196707121990032013

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4. Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	12
	2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia	38
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	41
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	85
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	91
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	100
	3.3. Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Dinas..	104
	3.4. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	116
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	116
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ..	118
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	

5.1. Program dan Kegiatan	126
---------------------------------	-----

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB VIII PENUTUP

PENDAHULUAN

- 
- **LATAR BELAKANG**
 - **LANDASAN HUKUM**
 - **MAKSUD DAN TUJUAN**
 - **SISTEMATIKA PENULISAN**

1

1.1. Latar Belakang

Dalam **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam batang tubuh konstitusi itu

juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sebab itu, perlu dilakukan transformasi sistem pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**.

Dalam **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003** juga mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menengah umum. Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Jika ditinjau dari perspektif era otonomi daerah saat ini, maka pembangunan pendidikan diarahkan pada bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mampu melakukan penjaminan terhadap ketersediaan layanan pendidikan yang terjangkau serta memiliki kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan pembangunan pendidikan yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur. Dengan cara ini diharapkan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pendidikan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan di daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan itu, maka Dinas Pendidikan sebagai salah satu unsur perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, serta diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode lima tahun kedepan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,

dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Sehingga Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini, juga melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di Kabupaten/Kota, dalam hal ini dengan mempertimbangkan masukan dan potensi-potensi kekuatan di setiap Renstra OPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2021- 2026 disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan ideal dan landasan operasional berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (berita negara republik indonesia tahun 2013 nomor 822);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Falidasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor :486);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud yang ingin dicapai dari rumusan renstra ini sebagai berikut :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang taktis strategis dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang pendidikan.
- b. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan jumlah, mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- c. Tersusunnya rencana kegiatan perluasan peluang dan bantuan secara selektif terhadap sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 dan S3.
- d. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan pembinaan mental spiritual (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara mandiri dan melembaga.
- e. Tersusunnya rencana kegiatan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)

- f. Tersusunnya rencana kegiatan Pendayagunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk pembelajaran
- g. Tersusunnya rencana kegiatan Penilaian pendidikan
- h. Tersusunnya rencana dan kegiatan kebudayaan .
- i. Tersediannya dokumen tentang informasi nilai-nilai sejarah, kesenian dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta potensi budaya di provinsi Sulawesi Tengah

1.3.2. Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan renstra ini sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk menjabarkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam TUPOKSI SKPD Dinas Pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- Sebagai acuan utama bagi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun dan merumuskan program dan kegiatan Tahunan atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
- Sebagai acuan dalam penetapan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dalam perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sebagai dasar pijakan bagi Dinas Pendidikan untuk mengukur dan evaluasi pencapaian kinerja satuan kerja.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Renstra Perubahan OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tahapan diatas, Renstra-OPD sebagai sebuah dokumen tepat, melalui urutan pilihan, dengan menghitung sumber daya tersedia. Pelaksanaan Renstra Perubahan OPD akan mengacu pada pencapaian tujuan Renstra OPD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi

Sulawesi Tengah yang merupakan komponen utama dari pencapaian Visi, Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sistematika penyusunan Restra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026, dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Dinas
- 3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

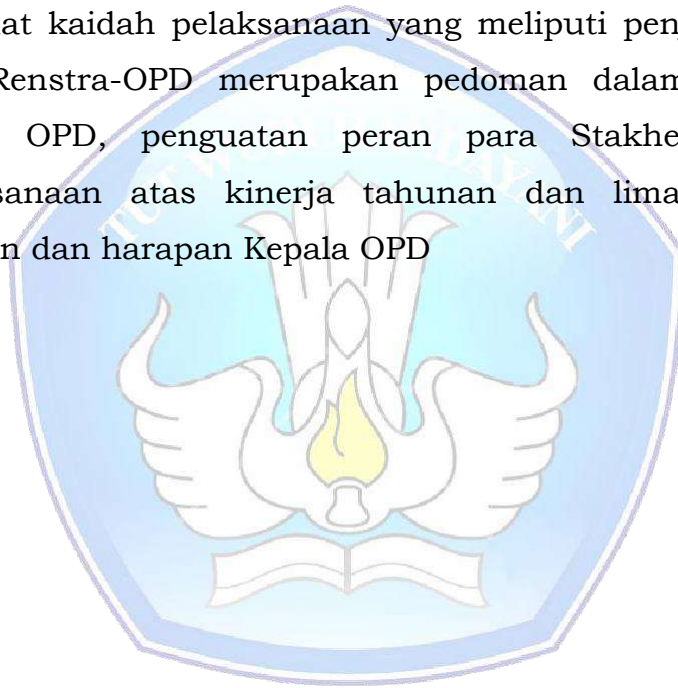
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Program dan Kegiatan

BAB VII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakheholder dalam pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun serta catatan dan harapan Kepala OPD



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
- **KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

2

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1. Sturktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami tiga fase perubahan hal ini disebabkan perubahan regulasi tentang struktur organisasi bidang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan tahun perubahan fase dimaksud adalah :

I. TAHUN 2016

Setelah disahkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) pada Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pada point A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendidikan mengakibatkan perubahan terhadap kewenangan Pengurusan Bidang Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan tersebut berimplementasi terhadap Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Merujuk terhadap Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan :

- 1) **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

Menjelaskan :

Pada Bab III Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 ayat (2) Poin d Sub Point (1) menjelaskan bahwa “

***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan “***

- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Menjelaskan :

Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kedua tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 ayat :

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah Tipe A;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan SMA :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA.
 - d. Bidang Pembinaan SMK :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK.
 - f. Bidang PTK dan Tugas Pembantuan :
 1. Seksi PTK SMA;

2. Seksi PTK SMK dan PKPLK;
 3. Seksi Tugas Pembantuan.
 - g. Bidang Kebudayaan :
 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang maha Esa;
 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya;
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - h. UPT Dinas;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Satuan Pendidikan Formal;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktruk Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3) **Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas, Unit Pelaksana Badan dan Cabang Dinas.

Menjelaskan :

- Pada Bab II tentang Pembentukan

a) Pasal 3 Point e :

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri dari :

1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP);
2. UPT Penilaian Pendidikan (UPT PENDIK);
3. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah;
4. UPT Museum Sulawesi Tengah.

b) Pasal 5 ayat (2) :

Cabang Dinas meliputi 6 wilayah sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Satu (I) Kota Palu;
2. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Dua (II) Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi;
3. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Tiga (III) Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Empat (IV) Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara;
5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Lima (V) Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Enam (VI) Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol.

- Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Paragraf 5 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 10 ayat :

(1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP) sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Susunan Organisasi Penilaian Pendidikan (UPT PENDIK) sebagai berikut:

- a. Kepala:

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Susunan Organisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan
- d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Susunan Organisasi Museum Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan
- d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

- Pada lampiran LXXVI sampai Lampiran LXXXI susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sampai Wilayah VI sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan SMA;
- d. Seksi Pembinaan SMK;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

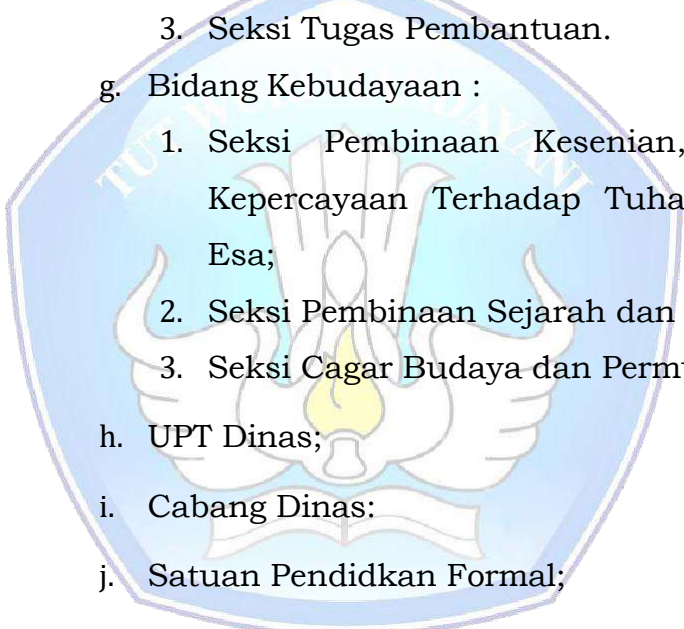
II. TAHUN 2018

Keluarnya **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017** Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) berimplementasi terhadap Perubahan ke - 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait

dengan UPT dan Cabang Dinas.

Merujuk terhadap perubahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan :

- 1) **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi. Menjelaskan :
 Pada Bab III Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 ayat (2) Poin d Sub Point (1) menjelaskan bahwa “ **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** “
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Menjelaskan :
 Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kedua tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 ayat :
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah Tipe A;
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan SMA :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA.
 - d. Bidang Pembinaan SMK :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;

- 
2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK.
 - f. Bidang PTK dan Tugas Pembantuan :
 1. Seksi PTK SMA;
 2. Seksi PTK SMK dan PKPLK;
 3. Seksi Tugas Pembantuan.
 - g. Bidang Kebudayaan :
 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya;
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - h. UPT Dinas;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Satuan Pendidikan Formal;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 3) **Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, yang merupakan

pengganti terhadap **Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas, Unit Pelaksana Badan dan Cabang Dinas.

Menjelaskan :

- Pada Bab II tentang Pembentukan

a) Pasal 3 Point e :

UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri dari :

1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP) Kelas B;
2. UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah Kelas A.

b) Pasal 5 ayat (2) :

Cabang Dinas meliputi 6 wilayah sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Satu (I) Kelas A Meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi berkedudukan di Kabupaten Sigi;
2. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Dua (II) Kelas A Meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
3. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Tiga (III) Kelas A Meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Kabupaten Poso;
4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Empat (IV) Kelas A Meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Kabupaten Morowali;
5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah

Wilayah Lima (V) Kelas A Meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai;

6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Enam (VI) Kelas A Meliputi Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang berkedudukan di Kabupaten Toli Toli.

- Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Paragraf 5 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 10 ayat :

(1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP) sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelestarian dan Pengembangan
4. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

- Pada lampiran LXXVI sampai Lampiran LXXXI susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sampai Wilayah VI sebagai berikut :

- a) Kepala;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pembinaan SMA;
- d) Seksi Pembinaan SMK;

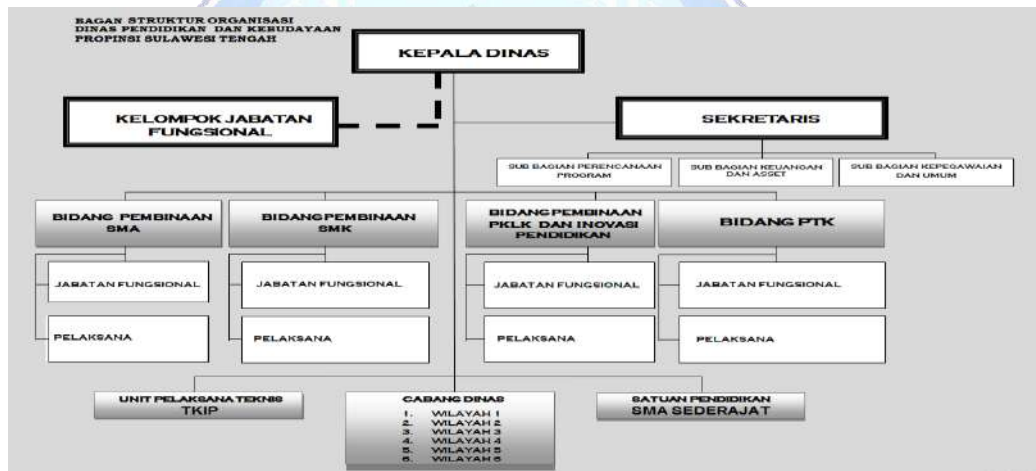
e) Kelompok Jabatan Fungsional.

III. TAHUN 2022

Sesuai **Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022** Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka perubahan Nomenklatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sejak ditetapkan Pergub tersebut mulai berlaku Tahun 2023 dapat dijabarkan dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

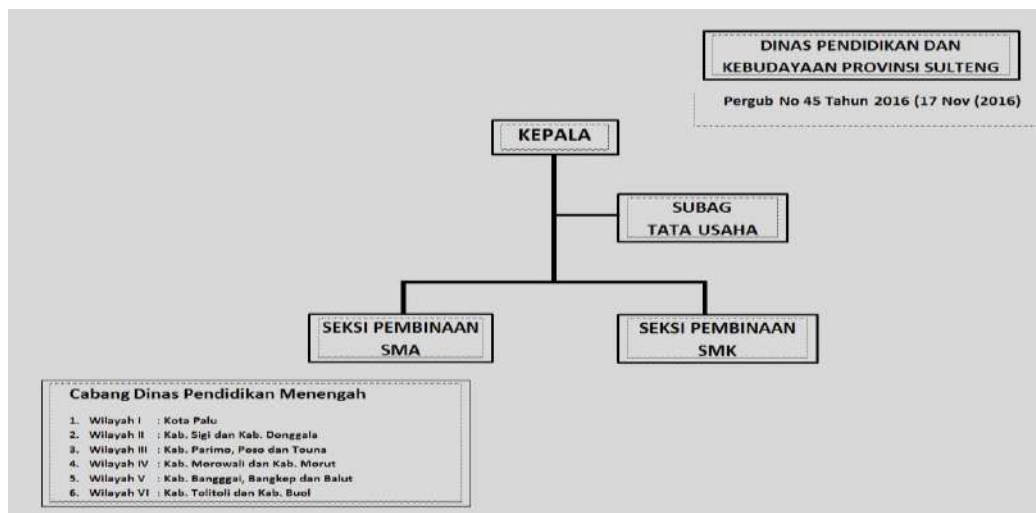
Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah



Adapun rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, masing-masing bidang, sub bidang, seksi dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh 16 orang pejabat eselon III yaitu : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK, Kepala Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan, serta Kepala Cabdis Wilayah I, II, III, IV, V dan VI.

Dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, serta
- d. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diberikan oleh Gubernur.

2). SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan asset;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah

tangga;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

Sub Bagian perencanaan dan program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
- c. Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan penyusunan laporan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan program dan laporan;
- f. Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
- g. Menyiapkan usulan penetapan rencana program kerja tahunan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan LAKIP;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
- j. Menyajikan bahan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas;
- k. Melakukan Perencanaan Operasional Program Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK & FTP, Kebudayaan serta Program kegiatan lainnya pada semua UPTD dan Cabang Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- l. Melakukan perencanaan strategis program penanggulangan pengurangan kemiskinan daerah; dan

- m. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Sub bagian keuangan dan asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, keuangan dan asset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan asset;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e. Melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- f. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
- g. Mengelola tata usaha keuangan dan asset penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
- i. Mengelola dana rutin APBD dan APBN;
- j. Melaksanakan pengawasan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- k. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan saran dan prasarana;
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
- m. Menyajikan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Dinas.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
- d. Mengelola Angka Kredit Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
- e. Menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
- f. Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
- g. Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
- h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat- rapat pertemuan;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- k. Mengusulkan biaya operasional Sekolah Model Negeri Madani Terpadu;
- l. Mengusulkan tunjangan fungsional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Model Negeri Madani Terpadu;

- m. Mengelola data pegawai Dinas, UPTD dan Cabdis;
- n. Menetapkan status pegawai;
- o. Menegakkan disiplin pegawai Dinas, UPTD dan Cabdis;
- p. Memberikan penghargaan kepada pegawai Dinas, UPT dan Cabdis;
- q. Menyiapkan data pegawai Dinas, UPTD dan Cabdis untuk mengikuti diklat;
- r. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Model Negeri Madani Terpadu Bertaraf Internasional;
- s. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kepegawaian dan Umum; serta
- t. Menyajikan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3). BIDANG PEMBINAAN SMA

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bidang Manajemen Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Pelaksanaan pengawasan kurikulum dan penggunaan sarana/prasarana pendidikan sesuai ketentuan;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait.

- g. Melakukan pembinaan/pengembangan Program MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) SMA lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan/pengembangan Program MKKS (Musyawarah Kepala-kepala Sekolah) SMA lintas kabupaten/kota

SEKSI PEMBINAAN PESERTA DIDIK SMA

Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA

Uraian tugas seksi Pembinaan Peserta Didik SMA meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMA;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMA;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMA dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan lomba/olimpiade SMA;
- f. Memberikan Bantuan Imbal Swadaya (BIS) SMA;
- g. Memberikan beasiswa;
- h. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN KURIKULUM SMA

Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMA dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan, bimbingan kurikulum tingkat satuan pendidik (KTSP) dan program kegiatan belajar (PKB) SMA
- f. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMA

Seksi Sarana dan Prasarana SMA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana SMA

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMA meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Sarana dan Prasarana SMA;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana SMA;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan

- kegiatan Sarana dan Prasarana SMA;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana SMA dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan bantuan sarana dan prasarana pendidikan SMA;
- f. Melakukan Pengawasan secara intensif terhadap penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Melakukan rehabilitasi gedung SMA Negeri dan Swasta;
- h. Mengusulkan pengembangan Unit Sekolah baru (USB);
- i. Memfasilitasi pengembangan sekolah menuju sekolah bertaraf internasional;
- j. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMA.

4) BIDANG PEMBINAAN SMK

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bidang Manajemen Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kurikulum dan penggunaan sarana/prasarana pendidikan sesuai ketentuan; dan
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait.

- g. Melakukan pembinaan/pengembangan Program MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) SMK lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan/pengembangan Program MKKS (Musyawarah Kepala-kepala Sekolah) SMK lintas kabupaten/kota
- i. Melakukan kerjasama dengan DUDI dan KADIN;

SEKSI PEMBINAAN PESERTA DIDIK SMK

Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik SMK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan lomba/olimpiade SMK;
- f. Memberikan bantuan Imbal Swadaya (BIS) SMK;
- g. Memberikan beasiswa;
- h. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN KURIKULUM SMK

Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi

Kelembagaan dan Kurikulum SMK.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum SMK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan, bimbingan kurikulum tingkat satuan pendidik (KTSP) dan program kegiatan belajar (PKB) SMK
- f. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMK

Seksi Sarana dan Prasarana SMK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana SMK.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMK meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Sarana dan Prasarana SMK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana SMK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana SMK;

- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana SMK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan bantuan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
- f. Melakukan Pengawasan secara intensif terhadap penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Melakukan rehabilitasi gedung SMK Negeri dan Swasta;
- h. Mengusulkan pengembangan Unit Sekolah baru (USB);
- i. Memfasilitasi pengembangan sekolah menuju sekolah bertaraf internasional;
- j. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMK

5) BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PKPLK)

Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Khusus dan layananana Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan khusus dan Layanan Khusus;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Khusus dan Layanan khusus;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/pembimbingan teknis di bidang pendidikan Khusus dan Layanan khusus;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaran tugas di bidang pendidikan Khusus dan Layanan khusus;
- e. Melaksanakan pengawasan kurikulum dan penggunaan sarana/prasarana pendidikan sesuai ketentuan; dan
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan

bidang/unit terkait.

SEKSI PEMBINAAN PESERTA DIDIK PKPLK

Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik PKPLK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan lomba/olimpiade PKPLK;
- f. Memberikan bantuan Imbal Swadaya (BIS) PKPLK;
- g. Memberikan beasiswa;
- h. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN KURIKULUM PKPLK

Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK. Uraian tugas Seksi

Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi

Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;

- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan, bimbingan kurikulum tingkat satuan pendidik (KTSP) dan program kegiatan belajar (PKB) PKPLK;
- f. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK.

SEKSI SARANA DAN PRASARA PKPLK

Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana PKPLK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana PKPLK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana PKPLK dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan bantuan sarana dan prasarana pendidikan PKPLK;

- f. Melakukan Pengawasan secara intensif terhadap penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Melakukan rehabilitasi gedung PKPLK;
- h. Mengusulkan pengembangan Unit Sekolah baru (USB);
- i. Memfasilitasi pengembangan sekolah menuju sekolah bertaraf internasional;
- j. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK

6) BIDANG PTK DAN FASILITASI TUGAS PEMBANTUAN

Bidang PTK dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang PTK dan Tugas Pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PTK dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang PTK dan Tugas Pembantuan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang TK dan Tugas Pembantuan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/pembimbingan teknis di bidang PTK dan Tugas Pembantuan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang PTK dan Tugas Pembantuan;
- e. Melaksanakan pengawasan PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan sesuai ketentuan; dan
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan bidang/unit terkait.

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) SMA

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA.

Uraian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA.
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pembinaan, pengembangan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA.
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMA.
- e. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan SMA;
- f. Melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMA;
- g. Melaksanakan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan SMA;
- h. Menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional pada jenjang Dikmen
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum, belajar mengajar pada SMA;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi, data penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi.

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) SMK DAN PKPLK

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK.

Uraian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK

dan PKPLK meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMK dan PKPLK;
- e. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan PKPLK;
- f. Melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan PKPLK;
- g. Melaksanakan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan PKPLK;
- h. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum, belajar mengajar pada pendidikan SMK dan PKPLK;
- i. Menyiapkan bahan dan data menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi.

SEKSI TUGAS PEMBANTUAN

Seksi Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Seksi Tugas Pembantuan.

Uraian tugas Seksi Tugas Pembantuan meliputi :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi
Seksi Tugas Pembantuan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Tugas Pembantuan;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan Seksi Tugas Pembantuan;

- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Tugas Pembantuan;
- e. Melaksanakan lomba/olimpiade untuk tingkat PAUD, SD, dan SMP;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi, data penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi.

2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya

Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan internal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat di identifikasikan sebagai kekuatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan di daerah karena tanpa sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Sejak beberapa tahun terakhir Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah pelatihan teknis baik aparatur maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara menyeluruh yang tentu saja akan merupakan program yang berkelanjutan sesuai tuntutan perkembangan di era globalisasi, termasuk pelatihan di bidang IT yang akan semakin ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Tuntutan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan sampai pada tahun 2026 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 4.812 orang tenaga ASN. Lebih rinci dapat dilihat pada Diagram :

Diagram 1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Menurut Tingkat Pendidikan.

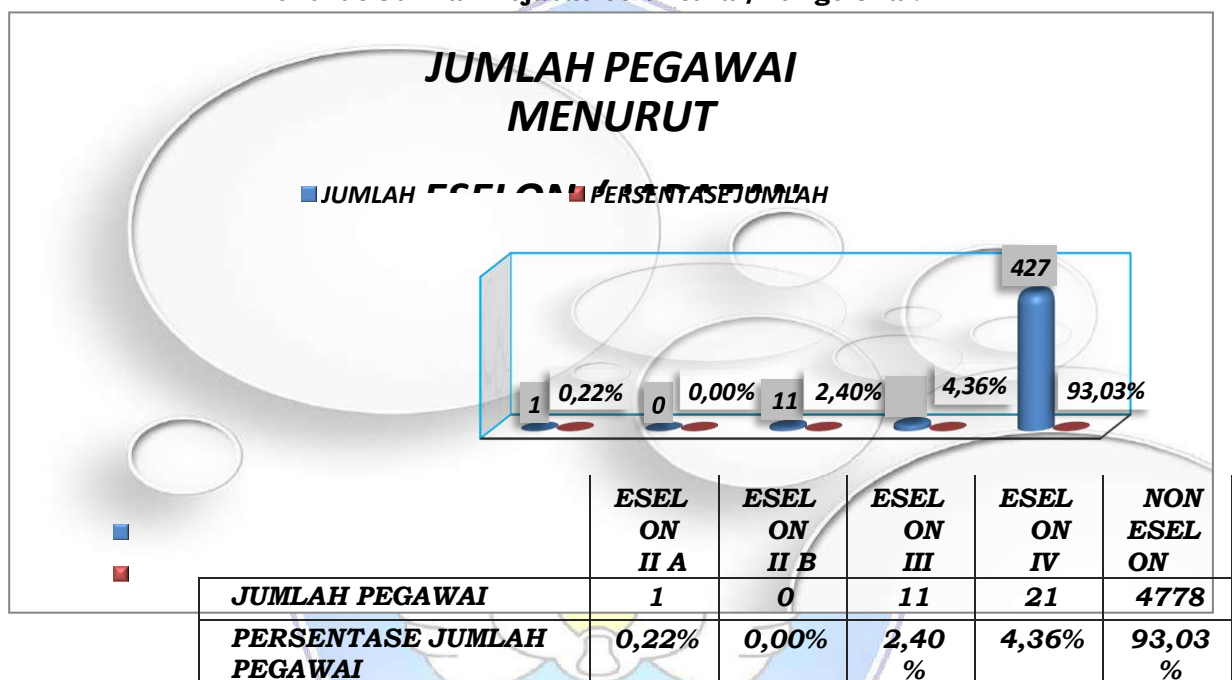


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dikda Prov. Sulteng

Jika diamati jumlah pegawai tersebut berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan yang ada, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sangat potensial, dimana untuk jenjang Pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah lima orang, untuk S2 berjumlah 738 Orang atau 45,53 % yang rata-rata berada pada pada eselon III dan eselon IV, dan bahkan ada yang masih Non Eselon tetapi sudah berkualifikasi S2. Sementara Strata S1 berjumlah 3.789 orang atau 58,22 % yang bahkan beberapa

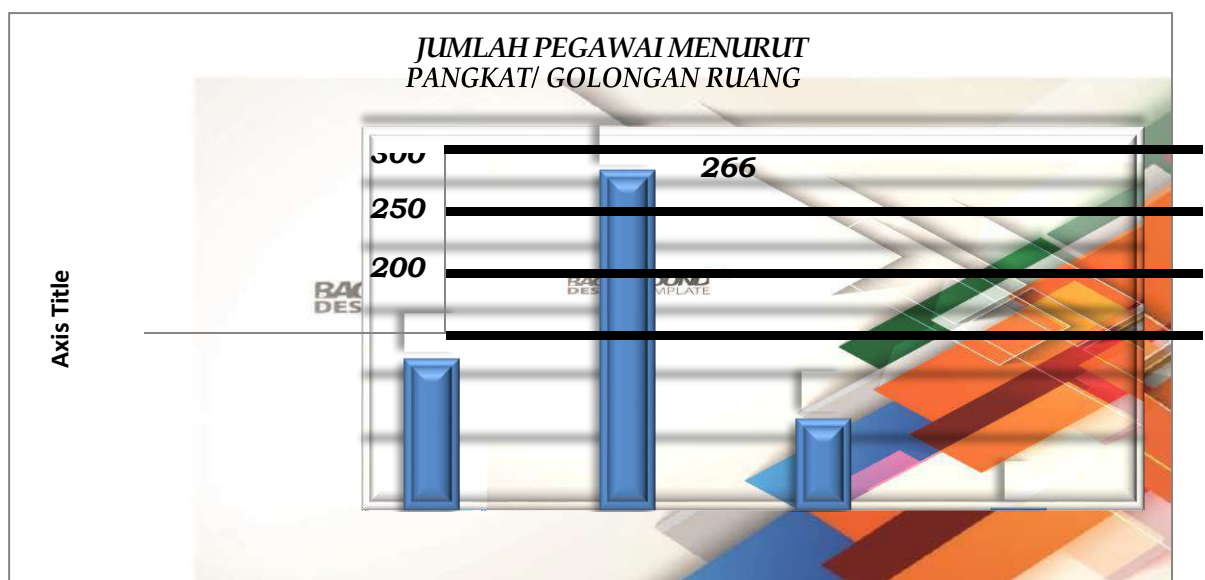
diantaranya sementara mengikuti izin belajar melanjutkan pendidikan ke S2 baik dengan atau tanpa bantuan biaya beasiswa, serta berkualifikasi SMA sederajat sebanyak 207 orang atau 53,14%, dan sisanya hanya 4 orang yang berkualifikasi SMP. Serta jumlah pegawai PPPK sebanyak 1.051 orang yang ditempatkan di beberapa satuan pendidikan sebagai tenaga Guru dan Administrasi.

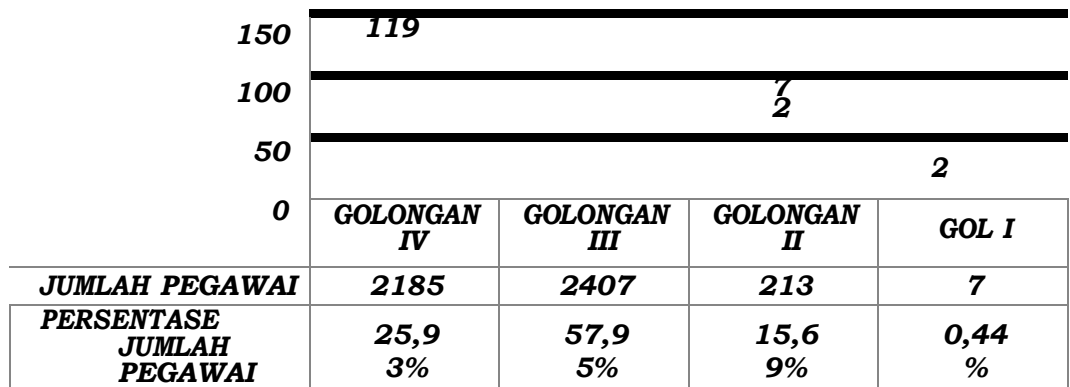
Diagram 2. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional.



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dikda Prov. Sulteng

Diagram 3. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pangkat/Golongan.





Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dikda Prov. Sulteng

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir, diperoleh informasi bahwa kinerja institusi termasuk dalam kondisi di atas rata-rata. Hal ini setidaknya tercermin dari kombinasi antara realisasi fisik keterlaksanaan masing-masing program dan kegiatan dengan realisasi anggaran, yang seluruhnya berada di atas atau sama dengan rata-rata

Kondisi ini juga didukung oleh hasil analisis data dan informasi tentang sasaran program dan kegiatan dalam rencana kerja masing-masing untuk tahun 2021 s/d 2026. Secara umum program dan kegiatan tersebut terlaksana sesuai target Yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021. Secara lebih rinci tentang capaian kinerja institusi selama beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut.:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Wajib																					
I. PENDIDIKAN																						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	APK SMA					83.43	83.88	84.43	84.88	85.38	83.5	83.75	84.75	85.25	85.5	-	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.12
2	APM SMA					64.50	65.00	65.50	65.75	68.00	64.5	64.75	65.75	66.5	66.5	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3	APK SMLB/Paket C					83.43	83.88	84.43	84.88	85.38	83.35	83.8	84.75	85.25	74.25	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Angka rata-rata Lama Sekolah				8.57	8.01	8.25	8.5	8.75	9	8.12	8.29	8.52	8.75	8.83	8.89	0.95	1.03	1.03	1.03	1.01	
5	APK SMK				83.08	83.43	83.88	84.43	84.88	85.38	83.5	83.75	84.75	85.25	85.5	85.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
6	APM SMK				64.00	64.51	65.01	65.50	65.75	68.01	64.5	64.7	64.7	65.75	66.5	66.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
7	APM SMLB					64.51	65.0	65.50	65.7	68.0		64.5	64.7	65.7	66	66	-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah					50	50.25	50.5	50.75	60	51	51.3	51.5	50.75	60.25	-	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah					50	50.25	50.5	50.75	60	51	51.3	51.5	50.75	60.25	-	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus					13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	-	1.00	1.00	1.00	1.00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Jumlah Fasilitas Sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya dan dokumentasi karya budaya					13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	-	1.00	1.00	1.00	1.00		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur					50	50.25	50.5	50.75	60		51	51.5	51.5	50.75		-	1.02	1.02	1.02	1.00	
13	Angka Kelulusan (AL) SD					96.8	97	97.1	97.15	97.25		96.8	97	97.1	97.15		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
14	Angka Putus Sekolah SD					1.76	1.57	1.35	1.2	1.1		1.6	1.3	1.2	1.2		-	0.91	0.83	0.89	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	Angka Kelulusan (AL) SMP					95	95.5	96	96.5	97.98		95	95.5	96	96.5		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
16	Angka Putus Sekolah SMP					12.5	10	9	8	7		11	9	8	8		-	0.88	0.90	0.89	1.00	
17	Angka Kelulusan (AL) SMA					95.5	95.75	95.9	96.25	99.15		95.5	95.75	95.9	96.25	97.75	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
18	Angka Putus Sekolah SMA					3.32	3.15	3	2.53	2.31		3.2	3.1	2.85	2.53	2.25	-	0.96	0.98	0.95	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19	Angka Kelulusan (AL) SMK					95.5	95.75	95.9	96.25	99.15		95.5	95.75	95.9	96.25	97.5	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
20	Angka Putus Sekolah SMK					3,33	3.15	3	2.53	2,32		3.2	3.1	2.85	2.53	2.25	-	-	0.98	0.95	1.00	
21	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B					25	27	30	33	35		25	27	30	33		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B					25	27	30	33	35		25	27	30	33		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
23	Persentase SMA berakreditasi minimal B					25	27	30	33	35		25	27	30	33	35	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
24	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi					25	27	30	33	35		25	27	30	33	35	-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	minimal B																					
25	Persentase PTK PAUD bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
26	Persentase PTK PAUD berkualifikasi S1					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	Persentase PTK PAUD berkualifikasi S2					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
28	Persentase PTK Dikmas Bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
29	Persentase guru di SD/SDLB bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30	Persentase guru di SD/SDLB Berkualifikasi S1					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
31	Persentase guru di SD/SDLB Berkualifikasi S2					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
32	Persentase guru di SMP/SMPLB bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
33	Persentase guru di SMP/SMPLB berkualifikasi S1					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
34	Persentase guru di SMP/SMPLB berkualifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
35	Persentase guru di SMA bersertifikasi					40	43	45	47	50	40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00		
36	Persentase guru di SMA berkualifikasi S1					40	43	45	47	50	40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
37	Persentase guru di SMA berkualifikasi S2					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
38	Persentase guru di SMK bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
39	Persentase guru di SMK berkualifikasi S1					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40	Persentase guru di SMK berkualifikasi S2					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
41	Persentase kepala sekolah di SD Bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42	Persentase kepala sekolah di SMP Bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
43	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
44	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
45	Persentase pengawas di SD bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
46	Persentase pengawas di SMP bersertifikasi					40	43	45	47	50	40	43	45	47			-	1.00	1.00	1.00	1.00	
47	Persentase pengawas di SMA bersertifikasi					40	43	45	47	50	40	43	45	47	50		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
48	Persentase pengawas di SMK bersertifikasi					40	43	45	47	50		40	43	45	47	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
49	Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata					27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

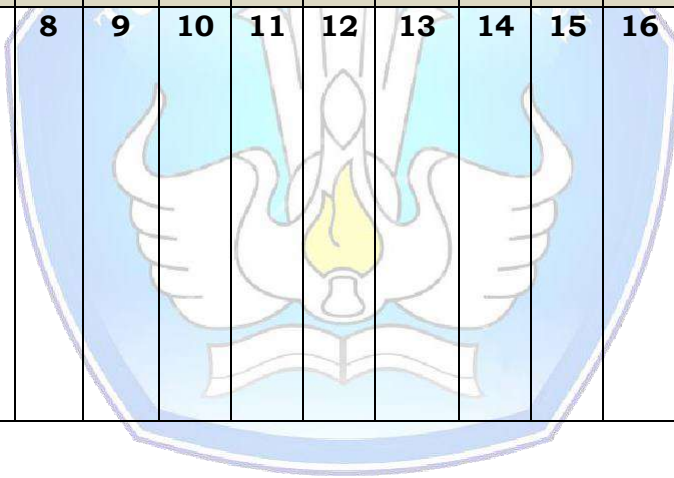
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50	Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata					27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
51	Rasio guru terhadap murid (SMA) per kelas rata-rata					27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
52	Rasio guru terhadap murid (SMK) per kelas rata-rata					27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru		27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	27 siswa/guru	-	1.00	1.00	1.00	1.00	
53	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurangkur					96	96.1	96.05	96.15	96.25		96	96.1	96.05	96.15		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	angnya 96,1%																					
54	Angka Melek Huruf/Buta Aksara					96.1	96.5	96.5	96.5	96.5		96.1	96.5	96.5	96.5		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55	Skor SAKIP minimal sebesar 80					80	81	82	83	84		80	81	83	83		-	1.00	1.00	1.01	1.00	
56	Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Wajar Tanpa					WT P	W TP	WT P	W TP	W TP		WT P	W TP	W TP	W TP	W TP	-	#V AL UE!	#V AL UE!	#V AL UE!	#V AL UE!	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Pengecualian (WTP)																					



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
57	Jumlah Sekolah di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tengah memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar					20	21	22	23	24	20.03	21	22	23	24	-	1.00	1.00	1.00	1.00		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
58	Jumlah Sekolah di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tengah memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan menengah					20	21	22	23	24	20.05	21	22	23			-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
59	APK SD					106.00	104.88	104.55	103.63	103.25		104	103	104.3	104		-	0.98	0.98	1.00	1.00	
60	APK SDLB/Paket A					106.01	104.88	104.56	103.63	103.26		104	103	104.3	104		-	0.98	0.98	1.00	1.00	
61	APM SD					93.00	93.43	94.13	94.38	95.38		92.9	93	94	94		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
62	APM SDLB					93.005	93.4	94.13	94.3	95.3		92.9	93	94	94		-	1.00	1.00	1.00	1.00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
63	APK SMP					91.55	92.05	92.50	92.88	93.38		91.5	92	92.30	92.5		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
64	APK SMPLB/Paket B					91.56	92.06	92.51	92.88	93.38		91.5	92	92.30	92.5		-	1.00	1.00	1.00	1.00	
65	APM SMP					72.13	73.13	74.13	74.38	74.88		72	73	74	74		-	1.00	1.00	1.00	0.99	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66	APM SMPLB					72.13	73.13	74.13	74.38	74.88		72	73	74	74		-	1.00	1.00	1.00	0.99	
67	APK PAUD usia 3-6 tahun					45.94	47.1	47.25	47.5	48		46.5	46.8	47.15	47.5		-	1.01	0.99	1.00	1.00	
68	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi					20	25	30	35	40		21	25	30	35		-	1.05	1.00	1.00	1.00	



Data APK/APM JENJANG SLTA/SEDERAJAT DI KAB/KOTA SE SULTENG TAHUN 2021

Sumber Data : <http://query.data.kemdikbud.go.id> (DAPODIKASMEN SULTENG)

			PESERTA DIDIK KESELURUHAN					PESERTA DIDIK 16 - 18 TAHUN					APK	APM
No.	Wilayah	Penduduk 16-18 TAHUN	SMA	SLB	SMK	Paket C	Jml	SMA	SLB	SMK	Paket C	Jml		
1	Kab. Banggai Kepulauan	6,414	3,475	40	2,081	1.230	6,826	2,596	4	1,537	256	4,393	106,42	68,49
2	Kab. Donggala	16,154	8,168	40	3,465	1,364	13,037	6,354	5	2,654	399	9,412	80,70	58,26
3	Kab. Poso	10,832	6,634	129	3,925	250	10,938	5,048	6	3.140	89	8,283	100,97	76,46
4	Kab. Banggai	17,183	10,981	165	5.040	1.130	17,316	7,957	13	3.710	127	11,807	100,77	68,71
5	Kab. Buol	7,764	4,769	66	2,811	571	8,217	3,546	7	1,936	22	5,511	105,83	70,98
6	Kab. Tolitoli	12,489	4,994	82	3,685	985	9,746	3,417	4	2,531	101	6,053	78,03	48,46
7	Kab. Morowali	5,944	4,015	98	1,838	891	6,842	3,092	2	1,433	203	4.730	115.10	79,57
8	Kab. Parigi Moutong	22,579	10,422	79	4.030	3.390	17,921	8,316	5	3,197	742	12.260	79,37	54,29
9	Kab. Tojo Una-Una	9,822	3,689	63	2,485	935	7,172	2,835	7	1,934	80	4,856	73,01	49,44
10	Kab. Sigi	12,425	6,112	150	2.100	1,677	10,039	4,656	19	1,577	272	6,524	80,79	52,50
11	Kab. Banggai Laut	5,183	1,701	40	1.590	562	3,893	1,171	2	1,179	35	2,387	75,11	46,05
12	Kab. Morowali Utara	7.670	2.860	33	2.090	792	5,775	2,214	2	1,664	61	3,941	75,29	51,38
13	Kota Palu	21,441	11.700	472	11,361	1.091	24,624	8,942	33	8,795	287	18,057	114,84	84,21
	Sulawesi Tengah	155.900	79.520	1.457	46,501	14,868	142,346	60,144	109	35,287	2.674	98,214	91.30	62,99

Data APK/APM JENJANG SLTA/SEDERAJAT DI KAB/KOTA SE SULTENG TAHUN 2022

Sumber Data : <http://query.data.kemdikbud.go.id> (DAPODIKDASMEN SULTENG)

			PESERTA DIDIK KESELURUHAN					PESERTA DIDIK 16 - 18 TAHUN					APK	APM
No.	Wilayah	Penduduk 16-18 TAHUN	SMA	SLB	SMK	Paket C	Jml	SMA	SMALB	SMK	Paket C	Jml		
1	Kab. Banggai Kepulauan	7,292	3,282	52	2,141	1.717	7,192	2,409	4	1,593	262	4,268	98,62	58,52
2	Kab. Donggala	14,446	8,003	42	3,488	1,227	12,760	6,174	8	2,609	164	8,955	88,32	61,98
3	Kab. Poso	11,125	6,758	122	3,626	322	10,828	5,015	8	2.781	91	7,895	97,33	70,96
4	Kab. Banggai	18,655	11,059	179	4,820	1.159	17,217	7,806	12	3.548	121	11,487	92,29	61,57
5	Kab. Buol	7,616	4,482	45	2,412	551	7,490	3,195	4	1.700	32	4,931	98,34	64,74
6	Kab. Tolitoli	11,451	4,868	84	3,203	956	9,111	3,324	9	2,287	100	5.720	79,56	49,95
7	Kab. Morowali	7,831	4,106	101	1,951	1.078	7,236	3,098	2	1,409	190	4,699	92,40	60,00
8	Kab. Parigi Moutong	20,348	10,453	111	3,647	3.960	18,171	8,102	6	2.853	792	11,753	89,30	57,75
9	Kab. Tojo Una-Una	7,835	3,587	50	2,406	1.073	7,116	2,689	8	1,787	116	4.600	90,82	58,71
10	Kab. Sigi	11,188	6,068	147	2,004	1.589	9,808	4,531	21	1,508	241	6.301	87,66	56,31
11	Kab. Banggai Laut	4,084	1,763	31	1,481	686	3,961	1.180	1	1.060	52	2,293	96,98	56,14
12	Kab. Morowali Utara	6,024	3,025	33	1,993	525	5,576	2,371	1	1.540	67	3,979	92,56	66,05
13	Kota Palu	25,032	12,022	557	10,236	1.309	24,124	9.188	34	7.859	278	17,359	96,37	69,34
	Sulawesi Tengah	152,927	79,476	1.554	43,408	16,152	140.590	59,082	118	32,534	2.506	94.240	91,33	61,62

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMA TAHUN 2019													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Banggai Kepulauan	4	3	18	25	1	12	25	38	5	15	43	63
2	Donggala	7	22	9	38	5	12	11	28	12	34	20	66
3	Poso	6	8	13	27	7	9	19	35	13	17	32	62
4	Banggai	9	16	14	39	7	13	23	43	16	29	37	82
5	Buol	8	14	8	30	3	5	12	20	11	19	20	50
6	Tolitoli	6	13	1	20	2	5	3	10	8	18	4	30
7	Morowali	2	3	5	10	1	5	9	15	3	8	14	25
8	Parigi Moutong	21	15	14	50	9	8	13	30	30	23	27	80
9	Tojo Una - Una	9	7	1	17	2	8	9	19	11	15	10	36
10	Sigi	0	10	6	16	0	15	17	32	0	25	23	48
11	Banggai Laut	0	1	3	4	1	3	4	8	1	4	7	12
12	Morowali Utara	0	1	7	8	0	1	8	9	0	2	15	17
13	Kota Palu	0	1	12	13	2	1	17	20	2	2	29	33
SULAWESI TENGAH		72	114	111	297	40	97	170	307	112	211	281	604

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMK TAHUN 2019													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Banggai Kepulauan	2	3	7	12	0	4	14	18	2	7	21	30
2	Donggala	5	22	57	84	7	20	41	68	12	42	98	152
3	Poso	0	0	15	15	0	0	14	14	0	0	29	29
4	Banggai	7	10	74	91	3	6	47	56	10	16	121	147
5	Buol	0	3	14	17	3	4	6	13	3	7	20	30
6	Tolitoli	0	12	33	45	2	7	10	19	2	19	43	64
7	Morowali	2	2	17	21	0	0	17	17	2	2	34	38
8	Parigi Moutong	0	26	64	90	2	19	62	83	2	45	126	173
9	Tojo Una - Una	2	3	3	8	1	0	5	6	3	3	8	14
10	Sigi	0	0	3	3	0	1	6	7	0	1	9	10
11	Banggai Laut	0	7	18	25	0	5	9	14	0	12	27	39
12	Morowali Utara	1	4	24	29	0	1	12	13	1	5	36	42
13	Kota Palu	11	16	31	58	8	10	17	35	19	26	48	93
SULAWESI TENGAH		30	108	360	498	8	77	260	363	56	185	620	861

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMA TAHUN 2020													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Kab. Banggai Kepulauan	0	9	4	13	3	5	7	15	3	14	11	28
2	Kab. Donggala	1	0	7	8	4	2	5	11	5	2	12	19
3	Kab. Poso	3	4	9	16	3	5	8	16	6	9	17	32
4	Kab. Banggai	6	10	19	35	11	8	18	37	17	18	37	72
5	Kab. Buol	10	4	8	22	4	4	18	26	14	8	26	48
6	Kab. Tolitoli	6	4	3	13	5	4	6	15	11	8	9	28
7	Kab. Morowali	7	1	8	16	1	2	6	9	8	3	14	25
8	Kab. Parigi Moutong	13	9	9	31	9	5	14	28	22	14	23	59
9	Kab. Tojo Una-Una	6	1	6	13	7	1	8	16	13	2	14	29
10	Kab. Sigi	8	9	16	33	6	4	18	28	14	13	34	61
11	Kab. Banggai Laut	0	3	4	7	2	3	6	11	2	6	10	18
12	Kab. Morowali Utara	2	2	3	7	0	3	4	7	2	5	7	14
13	Kota Palu	18	7	23	48	19	5	8	32	37	12	31	80
PROV. Sulawesi Tengah		80	63	119	262	74	51	126	251	154	114	245	513

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMK TAHUN 2020													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Kab. Banggai Kepulauan	0	2	17	19	1	1	18	20	1	3	35	39
2	Kab. Donggala	14	2	9	25	9	4	16	29	23	6	25	54
3	Kab. Poso	20	8	16	44	7	3	4	14	27	11	20	58
4	Kab. Banggai	10	7	17	34	6	4	16	26	16	11	33	60
5	Kab. Buol	16	8	35	59	9	4	24	37	25	12	59	96
6	Kab. Tolitoli	7	6	10	23	5	2	8	15	12	8	18	38
7	Kab. Morowali	5	1	4	10	1	1	7	9	6	2	11	19
8	Kab. Parigi Moutong	3	10	37	50	5	7	28	40	8	17	65	90
9	Kab. Tojo Una-Una	4	2	2	8	3	5	3	11	7	7	5	19
10	Kab. Sigi	6	2	11	19	0	2	10	12	6	4	21	31
11	Kab. Banggai Laut	2	4	8	14	0	2	9	11	2	6	17	25
12	Kab. Morowali Utara	3	0	1	4	1	0	1	2	4	0	2	6
13	Kota Palu	36	18	26	80	29	7	48	84	65	25	74	164
Prov. Sulawesi Tengah		126	70	193	389	76	42	192	310	202	112	385	699

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMA TAHUN 2021													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Kab. Banggai Kepulauan	1	0	1	2	1	0	3	4	2	0	4	6
2	Kab. Donggala	1	1	3	5	0	6	0	6	1	7	3	11
3	Kab. Poso	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
4	Kab. Banggai	1	0	3	4	5	0	3	8	6	0	6	12
5	Kab. Buol	4	0	1	5	2	2	2	6	6	2	3	11
6	Kab. Tolitoli	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
7	Kab. Morowali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Parigi Moutong	9	3	1	13	10	2	0	12	19	5	1	25
9	Kab. Tojo Una-Una	0	1	2	3	0	1	5	6	0	2	7	9
10	Kab. Sigi	3	0	4	7	3	5	4	12	6	5	8	19
11	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Morowali Utara	0	0	1	1	1	2	0	3	1	2	1	4
13	Kota Palu	6	0	2	8	7	0	1	8	13	0	3	16
PROV. Sulawesi Tengah		25	5	18	48	29	20	20	69	54	25	38	117

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT MENURUT KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH													
JENJANG SMK TAHUN 2021													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Kab. Banggai Kepulauan	2	0	2	4	0	0	1	1	2	0	3	5
2	Kab. Donggala	1	0	1	2	0	2	0	2	1	2	1	4
3	Kab. Poso	1	4	1	6	2	0	0	2	3	4	1	8
4	Kab. Banggai	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
5	Kab. Buol	0	0	1	1	0	1	2	3	0	1	3	4
6	Kab. Tolitoli	1	0	1	2	2	0	0	2	3	0	1	4
7	Kab. Morowali	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2
8	Kab. Parigi Moutong	3	1	2	6	2	2	4	8	5	3	6	14
9	Kab. Tojo Una-Una	0	2	0	2	0	1	0	1	0	3	0	3
10	Kab. Sigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Banggai Laut	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Kab. Morowali Utara	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	2
13	Kota Palu	8	7	30	45	23	1	15	39	31	8	45	84
Prov. Sulawesi Tengah		16	15	40	71	31	8	22	61	47	23	62	132

JUMLAH PUTUS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT													
TIAP KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH TAHUN 2022													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Donggala	0	1	2	3	0	4	3	7	0	5	5	10
3	Poso	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	4	5
4	Banggai	1	1	12	14	2	1	7	10	3	2	19	24
5	Buol	3	0	1	4	0	4	8	12	3	4	9	16
6	Tolitoli	1	2	0	3	0	2	2	4	1	4	2	7
7	Morowali	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Parigi Moutong	0	3	1	4	0	0	3	3	0	3	4	7
9	Tojo Una - Una	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
10	Sigi	1	0	0	1	0	2	3	5	1	2	3	6
11	Banggai Laut	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2
12	Morowali Utara	0	0	3	3	0	2	6	8	0	2	9	11
13	Kota Palu	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
SULAWESI TENGAH		8	8	25	41	3	15	35	53	11	23	60	94

JUMLAH PUTUS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT													
TIAP KAB/KOTA SE SULAWESI TENGAH TAHUN 2022													
No.	Kab/Kota	Laki - Laki				Perempuan				Laki - Laki dan Perempuan			
		X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML	X	XI	XII	JML
1	Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Donggala	1	0	0	1	0	0	5	5	1	0	5	6
3	Poso	1	1	0	2	0	1	0	1	1	2	0	3
4	Banggai	2	0	0	2	1	0	0	1	3	0	0	3
5	Buol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tolitoli	1	2	8	11	0	1	7	8	1	3	15	19
7	Morowali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Parigi Moutong	1	0	0	1	0	1	3	4	1	1	3	5
9	Tojo Una - Una	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sigi	1	1	0	2	3	0	0	3	4	1	0	5
11	Banggai Laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Morowali Utara	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	2	4
13	Kota Palu	8	4	11	23	4	4	6	14	12	8	17	37
SULAWESI TENGAH		15	10	19	44	8	7	23	38	23	17	42	82



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Tantangan Pelayanan serta faktor-faktor pelayanan yang dapat berguna untuk menganalisis isu-isu kunci berkaitan dengan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik manajemen baku (standard) yang digunakan untuk perencanaan dan telah banyak digunakan sebagai kerangka kerja (*framework*) untuk menilai berbagai isu-isu strategis dalam bidang pendidikan.

Empat elemen dalam analisis SWOT biasanya mengandung pengertian untuk *Strengths* (kekuatan-kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang), dan *Threats* (ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan).

Strengths merupakan analisis dari kekuatan internal yang dimulai dengan identifikasi dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Weakness merupakan faktor-faktor dalam sistem pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang dianggap sebagai penghambat untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karena itu harus dikurangi atau dihilangkan.

Opportunities merupakan faktor-faktor yang berada di luar sistem, dalam hal ini berada dalam lingkungan baik nasional maupun internasional, yang dianggap akan memberikan kesempatan bagi pencapaian visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Threats merupakan faktor-faktor lingkungan yang diperkirakan akan menjadi ancaman atau hambatan bagi pencapaian visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Studi ini telah mencoba melakukan analisis SWOT tentang isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1). **Strengths (kekuatan)**

- Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan, serta Pengelolaan Manajemen dan Pencitraan Publik;
- Adanya dukungan dari Implementasi anggaran pendidikan sebesar 20% oleh pemerintah sesuai tuntutan Undang-undang;
- Tersedianya petunjuk standard pelayanan pendidikan;
- Tersedianya layanan dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus yang memadai;
- Tersedianya sarana prasarana kependidikan yang memadai;
- Kualitas dan Kuantitas guru yang tersebar secara merata disemua jenjang pendidikan pada satuan pendidikan;
- Kesadaran tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi tinggi;
- Keberhasilan program Wajar Dikdas 9 tahun, dan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Wajar 12 Tahun;
- Potensi Benda Cagar Budaya serta nilai seni dan sejarah yang sangat beragam untuk mengembangkan sektor kebudayaan;
- Memiliki keragaman budaya yang tersebar di 12 etnis pada 10 Kabupaten dan 1 Kota;
- Adanya dukungan pemerintah daerah untuk lebih giat mengembangkan kebudayaan di daerah Sulawesi Tengah.

2). **Weakness (kelemahan)**

- Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih rendah;
- Faktor ekonomi dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan terpencil serta daerah pasca konflik maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik);
- Rendahnya aksesibilitas anak usia sekolah khususnya di wilayah terpencil karena keadaan demografi yang terisolir dari daerah yang menyediakan fasilitas bagi pendidikan anak usia dini dan

juga disebabkan kondisi ekonomi keluarga;

- Ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Kesejahteraan pendidik yang belum memadai;
- Sarana dan Prasarana belajar yang belum cukup dan belum didayagunakan secara optimal;
- Biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran;
- Kurang tersedianya guru yang berkualifikasi PTK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- Tingkat penguasaan teknologi dan manajemen, keterampilan penggunaan ICT yang masih rendah;
- Kapasitas pengelola pendidikan di daerah masih rendah bila di tinjau dari kompetensi pengelola secara kuantitatif baik dari tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM dari pengelolah;
- Kualitas kemampuan SDM professional bidang kebudayaan dan Pengelola benda cagar budaya belum memadai;
- Dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan masih belum optimal serta kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kinerja pendidikan melalui komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

3). **Opportunities (kesempatan)**

- Melalui otonomi daerah, memberikan kesempatan untuk membuka jaringan kerja (networking) dengan pihak-pihak di luar Sulawesi Tengah baik pada lingkup nasional maupun internasional;
- Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta

memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik;

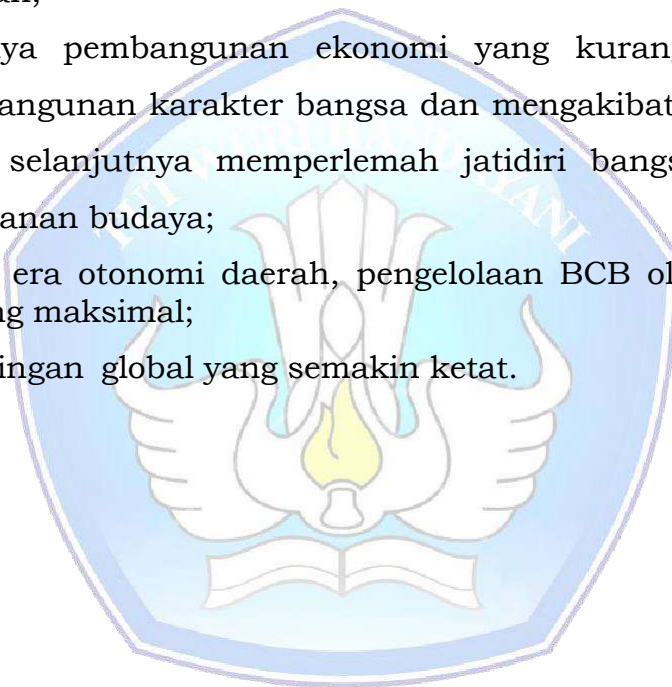
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak;
- Terdapat berbagai perguruan tinggi, yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- Wilayah Geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang terpencar dan terpencil;
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif pasca kerusuhan Poso;
- Meningkatnya minat masyarakat internasional untuk mengadakan kunjungan/penelitian terhadap Benda-benda Cagar Budaya;
- Dukungan pemerintah kabupaten terhadap pendidikan cukup tinggi.

4). **Threats (ancaman)**

- Keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan pendidikan;
- Kurangnya penyediaan kesempatan belajar pada pendidikan dasar, khususnya SMP atau satuan pendidikan yang sederajat;
- Berpindahnya sumberdaya manusia Sulawesi Tengah yang berkualitas untuk berkompetisi dalam pasar global di luar wilayah Sulawesi Tengah;
- Dampak globalisasi akan masuknya sumber daya manusia berkualitas dari luar Sulawesi Tengah, sehingga sumberdaya manusia Sulawesi Tengah menjadi kalah dalam persaingan global di wilayah Sulawesi Tengah;
- Kekurangan sumber daya manusia terdidik dalam area yang penting seperti teknologi dan manajemen informasi;
- Memiliki hasrat yang rendah untuk mempelajari bidang-bidang manajemen dan teknologi;
- Menurunnya semangat kerja pendidik, karena sarana prasarana

penunjang kurang memadai;

- Meningkatnya angka kemiskinan pada masyarakat;
- Adanya pengaruh negatif budaya dari luar;
- Angka melanjutkan lulusan SMA ke perguruan tinggi masih rendah;
- Semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik, serta tindak kejahatan lainnya yang melibatkan anak usia sekolah;
- Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jatidiri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya;
- Sejak era otonomi daerah, pengelolaan BCB oleh daerah menjadi kurang maksimal;
- Persaingan global yang semakin ketat.



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

- IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
- TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- TELAAHAN RENSTRA K/L DENGAN RENSTRA DINAS
- TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap

menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antar budaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan.

Dinas Pendidikan mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kementerian Pendidikan sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam periode yang lalu (2016-2020), Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan Nawacita serta Kebijakan RPJMD dalam berbagai program kerja prioritas, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Memasuki periode selanjutnya (2021-2026), Dinas Pendidikan kembali mengelola sektor pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan

antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, sesuai arahan Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, tentang Merdeka Belajar, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku

kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Selain berbagai potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus diatasi dalam kurun waktu 2021-2026.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan (APM), khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Namun, jika dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.

Salah satu permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan erat dengan akses adalah banyaknya anak putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu penyebab terjadinya anak putus sekolah adalah kemiskinan. Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.

Disparitas juga terjadi pada indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Sebab itu, kewenangan dan

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara konsekuen.

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah daerah karena dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya tidak pernah dicantumkan kewajiban pemerintah daerah dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan. Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa miskin, BKM, BOM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Karena itu, kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme dan metode penyaluran yang lebih baik.

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebab itu, kebijakan terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir perlu dilanjutkan dengan menitikberatkan pembangunan pada kabupaten dengan angka partisipasi pendidikan yang relatif masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan hingga ke daerah terpencil.

Meski belum memiliki data akurat, diprediksi bahwa rasio Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Jadi, pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke

depan juga perlu memperhatikan upaya pengurangan disparitas antar gender.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya mutu pendidikan. Meski dalam berbagai olimpiade nasional beberapa peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu indikator mutu yang tinggi, tetapi secara global, mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih termasuk rendah. Pada level nasional, kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi lain terutama provinsi yang ada di wilayah pulau jawa.

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya (*mismatch*) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal. Karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat **Undang-Undang No. 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen, mengembangkan program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan dari nilai UN.

Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Jika ditinjau secara keseluruhan rasio siswa/guru sudah sangat baik, tetapi disparitas antar kabupaten/kota masih cukup lebar, bahkan di daerah terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu atau dua orang guru. Karena itu, penerapan **Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007** yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak kabupaten/kota. Di beberapa daerah bahkan persentase gaji guru dan tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan lain tidak tersedia.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum tersebut, antara lain dikenal **Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 dan terakhir Kurikulum Merdeka**. Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Meski kehadiran kurikulum 2013 telah mengakomodir hampir seluruh kekurangan dan kelemahan kurikulum sebelumnya, tetapi penerapannya di sekolah masih menuai banyak hambatan, terutama ditinjau dari aspek kompetensi guru untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dalam penciptaan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien belum optimal. Selain itu, belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota dan satuan

pendidikan serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian

Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian di masa datang. Keberadaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berperan cukup besar dalam membantu mengatasi permasalahan ini bagi kepentingan pembangunan pendidikan di daerah.

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat kontra- produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru menjadi salah satu contoh nyata yang terjadi saat ini. Dengan harapan memperoleh kualifikasi akademik S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan, tidak sedikit guru yang lebih fokus pada aktivitas tersebut dengan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya komitmen guru dalam melaksanakan tugas

profesi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan pendidikan yang berkeadilan.

Rendahnya daya saing pendidikan antar wilayah kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan pendidikan ke depan. Keberadaan sekolah unggulan masih didominasi oleh daerah perkotaan, atau belum menyebar di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka kecenderungan penumpukan siswa di daerah perkotaan akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya disparitas APK antar wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada peluang bagi sebagian anggaran yang belum sepenuhnya dibelanjakan secara efektif dan efisien. Hal ini, antara lain karena masih adanya orientasi proyek pada sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja sebagai bukti keberhasilan pembangunan pendidikan belum menjadi tujuan utama. Karena itu,

kualitas pemantauan dan evaluasi program dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu ditingkatkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai bahan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No .	Masalah Pokok	No .	Masalah
1	2	3	4
1	REVITALISASI SMK	1	TATA KELOLAH KELEMBAGAAN
		2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		3	KURIKULUM SMK
2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4	KERJASAMA DU/ DI
		1	KURANGNYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
		2	BELUM TERPETAKAN/ TERDISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SESUAI KEBUTUHAN PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
3	SARANA PRASARANA SMA, SMK DAN SLB	3	KURANGNYA PEMBINAAN SDM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		1	BELUM MAKSIMALNYA SAPRAS UTAMA DI SATUAN PENDIDIKAN
		2	BELUM MAKSIMALNYA SAPRAS PENDUKUNG DI SATUAN PENDIDIKAN
5	REFORMASI BIROKRASI	3	BELUM MAKSIMALNYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DI SATUAN PENDIDIKAN
		1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELUM MENYESUAIKAN DENGAN STRUKTUR KEMENTERIAN TEKNIK
		2	BELUM TERAKOMODIRNYA BIDANG KEBUDAYAAN DAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS PADA TUSI CABANG DINAS
		3	KURANGNYA PEMBINAAN SDM APARATUR

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

yang berlandaskan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2021-2026 yakni :

“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”.

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah **Gerak Cepat, Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**. Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut :

3.2.1. **Gerak Cepat** : Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan

secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

3.2.2. **Lebih Sejahtera** : Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan

potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

3.2.3. **Lebih Maju** : Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis

dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam **RPJMD Periode 2021- 2026** harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam **RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025**, yaitu

“SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN”

Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan informasi;

3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;
4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah

Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;

8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dengan Renstra

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada **UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025.

Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan.

Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)**.

Tema Pembangunan dalam **RPJMN-IV (2020-2024)** yaitu :

“Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil
Dan Makmur Melalui Percepatan Pembangunan Di Segala
Bidang Dengan Struktur Ekonomi Yang Kokoh
Berlandaskan Keunggulan Kompetitif”.

Pada periode keempat, saat ini pembangunan pendidikan
difokuskan sebagai

TAHAP PENDIDIKAN YANG MENYIAPKAN MANUSIA
INDONESIA UNTUK MEMILIKI : “DAYA SAING
INTERNASIONAL”

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020- 2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun **VISI KEMENDIKBUD 2020-2024** adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan

kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan **MISI** nomor :

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4
VISI : Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalarkritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global			
MISI KE-1 : Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi			
Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan	Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita
			Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD

			Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD
			Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD
			Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding)
			Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD
			Menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
			Memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
			Menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
			Mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG
			Melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah
			Mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan
			Mengundang partisipasi DU/DI dalam penyalarsan kurikulum pendidikan vokasi, penyalarsan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi
			Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri
			Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;

			Mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa- siswi SMK di seluruh Indonesia;
			Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
			Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
			Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
			Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
			Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
			Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
			Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
			Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
			Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
			Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK
			Mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university;
			Merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;

			Meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
			Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
			Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
			Meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
			Meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian
			Meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
			Membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
			Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam 'pentahelix' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
			Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
			Meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
			Mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;

			Mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
			Melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri / masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
			Memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri
			Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
			Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI
			Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
			Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
			Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
			Mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
			Menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan

			Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela
			Memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
			Selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
			Mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar memproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
			Memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
			Menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
			Memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
			Memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
			Menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
			Memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
			Menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan	Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
			Mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
			Mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
			Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
			Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal
			Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
			Mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
			Melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
			Berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
			Menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
			Membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi

			upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan
			Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
			Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru
			Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
			Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
			Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
			Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
			Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
			Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah
			Mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
			Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain
			Membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
			Mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;

			Melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;
			Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
			Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
			Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan
			Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
			Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
			Mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif
			Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
			Mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah
			Mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
			Mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
			Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;

			Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
			Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
			Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan
		Peningkatan Relevansi Pendidikan	Mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
			Melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
			Mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat)
			Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana
			Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana
			Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus
Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	Menguatnya karakter peserta didik	Pemantapan budaya dan karakter bangsa	Fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
			Memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan
			Menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi

3.4. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mempunya Tugas **“Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tugas Pembantuan lainnya yang ditugas pada Provinsi”** serta fungsi untuk melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Sarana dan Prasarana Pendidikan maka dalam Implementasinya tentunya berkorelasi dengan kebijakan dalam rencana tata ruang (RTWT) maupun kajian lingkungan hidup lainnya karna hal yang mendasar pada kewenangan yang menjadi urusan Dinas Pendidikan Provinsi ada pada lingkungan hidup strategis yaitu intervensi Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan Layanan Khusus yang ada dimasing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review dari permasalahan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai penilaian Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
2. Belum terlaksananya secara Optimal Mekanisme Pembinaan Pendidikan dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan
3. Meningkatkan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Distribusi dan Alokasi Pembinaan Pendidikan sesuai kewenangan secara kualitas dan kuantitas belum merata masih perlu banyak pembinaan terhadap ketercapaian pembangunan Pendidikan
5. Belum optimalnya system data Pendidikan yang dikelola sehingga masih mempengaruhi capaian Indikator pelaksanaan Pendidikan.

TUJUAN DAN SASARAN

- **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026**

4

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya Visi. Sasaran adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis pembangunan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Arah Kebijakan dan Strategi adalah suatu tindakan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sangat analitis, konseptual, rasional dan bersifat komprehensif berbagai langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Visi dan Misi, berdasarkan analisis factor internal dan eksteren diuraikan dalam Tabel T - C . 2 5 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	69.65	73.61	77.01	81.48	84.88	91.94
		Meningkatkan Akses, Mutu Serta Tata Kelola Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Nilai Mutu Pendidikan SMA		55,73	54,02	54,03	54,04	54,05
			Nilai Mutu Pendidikan SMK		50,83	50,39	50,40	50,41	50,42
			Nilai Mutu Pendidikan SLB		46,46	53,84	53,85	53,86	53,87
			Nilai APS USIA 16-18		76,32	75,84	75,85	75,86	75,87

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk membantu pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan. Pengukuran capaian SPM tersebut harus menggunakan data yang akurat, sahih, dan terkini yang akan dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Delapan indikator prioritas provinsi adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas. Dari 8 (delapan) Indikator yang menjadi acuan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel Dukungan T-C.25

Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator	Target Capaian 2021	Target Capaian 2022	Target Capaian 2023	Target Capaian 2024	Target Capaian 2025	Target Capaian 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	76.33	75.84	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Usia 4-18 Tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	31.92	21.35	100	100	100	100
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.47	80.86	84.91	85.91	86.91	87.91
4	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja	65.00	65.00	79.00	80.00	81.00	82.00

	Lulusan SMK						
5	Indeks Iklim Keamanan SMA	79.28	80.21	86.99	87.99	88.99	90.99
6	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	65.68	86.51	91.25	92.25	93.25	94.25
7	Indeks Inklusivitas SMA	68.65	78.13	84.49	85.49	86.49	87.49
8	Indeks Iklim Keamanan SMK	76.32	77.78	84.6	85.6	86.6	87.6
9	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	62.76	81.2	86.00	87.00	88.00	89.00
10	Indeks Inklusivitas SMK	66.52	74.35	80.67	81.67	82.67	83.67
11	Indeks Iklim Keamanan SDLB	80.48	79.00	86.02	87.02	88.02	89.02
12	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	60.00	82.60	87.72	88.72	89.72	90.72
13	Indeks Inklusivitas SDLB	71.20	67.67	74.19	75.19	76.19	77.19
14	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	89.26	70.11	76.97	77.97	78.97	79.97
15	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	67.09	68.17	72.63	73.63	74.63	75.63
16	Indeks Inklusivitas SMPLB	87.09	73.54	80.30	81.30	82.30	83.30
17	Indeks Iklim Keamanan SMALB	84.70	76.98	83.72	84.72	85.72	86.72
18	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	66.90	78.27	82.63	83.63	84.63	85.63
19	Indeks Inklusivitas SMALB	87.80	72.80	79.52	80.52	81.52	82.52
20	Rerata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	59.26	58.11	64.22	65.22	66.22	67.22
21	Rerata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	48.72	49.44	53.35	54.35	55.35	56.35
22	Rerata Kompetensi Literasi SMK	56.64	55.04	60.81	61.81	62.81	63.81

	Berdasarkan Asesmen Nasional						
23	Rerata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	47.90	48.15	51.89	52.89	53.89	54.89
24	Rerata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	47.14	68.60	74.51	75.51	76.51	77.51
25	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	59.26	58.11	64.22	65.22	66.22	67.22
26	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	48.72	49.44	53.35	54.35	55.35	56.35
27	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	56.64	55.04	60.81	61.81	62.81	63.81
28	Rerata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	47.90	48.15	51.89	52.89	53.89	54.89
29	Rerata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	47.14	68.60	74.51	75.51	76.51	77.51

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

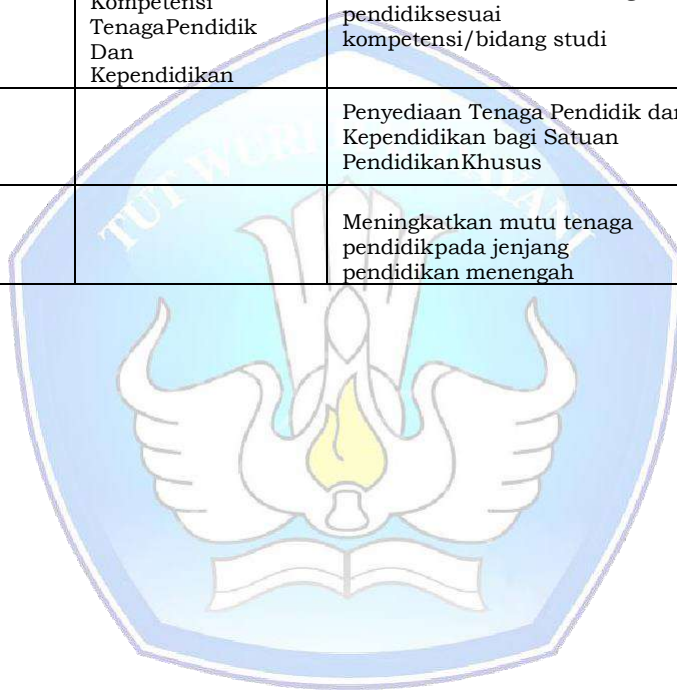


5

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	3	3	3
VISI : GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU			
MISI KE-1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.			
Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	Pembangunan sarana dan prasarana SMA yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMA
		Pemeliharaan sarana dan prasarana SMA guna menunjang pemerataan pendidikan menengah	
		Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain	
		Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum
			Melaksanakan Fasilitas Bantuan Sosial Fakir Miskin
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus
		Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan
		Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan	
		Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	Pembangunan sarana dan prasarana SMK yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMK
		Pemeliharaan sarana dan prasarana SMK guna menunjang pemerataan pendidikan menengah	

		Menyelenggarakan pendidikan vokasi	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri,
		Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis	
		Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan	
	Meningkatnya Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/ bidang studi	Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
		Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah	



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

- **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**



6



encana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, telah disusun beberapa rencana program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2016 -2017. Rencana program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan sasaran-sasaran strategic berdasarkan RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

5.1. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (Renja) serta program jangka menengah (RPJMD) yang di break down dalam bentuk Program dan kegiatan tertera pada Tabel 6.1 yaitu :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		LOKASI
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Pembangunan Pendidikan dan mampu berdaya saing				Angka Rata-Rata lama Sekolah		8,89		8,89		9,00		9,25		9,50		10,00		10,00		
	Terlaksananya Sistem Pendidikan yang dapat mengukur ketercapaian Pembangunan Pendidikan			Harapan lama Sekolah		13,23		13,23		13,50		13,60		13,75		14,00		14,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100	630.928.752.077	100	757.114.502.492	100	897.521.402.991	100	1.077.025.683.589	100	1.292.430.820.307	100	1.550.916.984.368	100	6.205.938.145.824	
			- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		3	9.997.500.000	3	11.997.000.000	3	3.380.400.000	3	4.056.480.000	3	4.867.776.000	3	5.841.331.200	18	40.140.487.200	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	747.500.000	100	897.000.000	100	1.076.400.000	100	1.291.680.000	100	1.550.016.000	100	1.860.019.200	100	7.422.615.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	746.496.000	100	2.978.976.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	746.496.000	100	2.978.976.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	746.496.000	100	2.978.976.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	746.496.000	100	2.978.976.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	8.050.000.000	8	9.660.000.000	100	576.000.000	100	691.200.000	100	829.440.000	100	995.328.000	100	20.801.968.000	
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah		3	599.431.252.077	3	719.317.502.492	3	863.181.002.991	3	1.035.817.203.589	3	1.242.980.644.307	3	1.491.576.773.168	18	5.952.304.378.624	
			- Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang di Bayarkan		5300	598.031.252.077	5300	717.637.502.492	5300	861.165.002.991	5300	1.033.398.003.589	5300	1.240.077.604.307	5300	1.488.093.125.168	31800	5.938.402.490.624	
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Pengelolaan dan Penyajian Bahan TanggapanPemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan TanggapanPemeriksaan		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran		100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	

				- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.400.000.000	1	1.680.000.000	1	2.016.000.000	1	2.419.200.000	1	2.903.040.000	1	3.483.648.000	6	13.901.888.000	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	1	700.000.000	1	840.000.000	1	1.008.000.000	1	1.209.600.000	1	1.451.520.000	1	1.741.824.000	6	6.950.944.000	
				- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	1	2.400.000.000	1	2.880.000.000	1	3.456.000.000	1	4.147.200.000	1	4.976.640.000	1	5.971.968.000	6	23.831.808.000	
				- Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
				- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
				- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
				- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
				- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
				- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN	100	100.000.000	100	120.000.000	100	144.000.000	100	172.800.000	100	207.360.000	100	248.832.000	100	992.992.000	
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
				- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	

			- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	12	2.650.000.000	12	3.180.000.000	12	3.816.000.000	12	4.579.200.000	12	5.495.040.000	12	6.594.048.000	72	26.314.288.000	
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	311.040.000	100	373.248.000	100	1.489.488.000	
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	311.040.000	100	373.248.000	100	1.489.488.000	
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	311.040.000	100	373.248.000	100	1.489.488.000	
			- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	311.040.000	100	373.248.000	100	1.489.488.000	
			- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	311.040.000	100	373.248.000	100	1.489.488.000	
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	200.000.000	100	240.000.000	100	288.000.000	100	345.600.000	100	414.720.000	100	497.664.000	100	1.985.984.000	
			- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
			- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	10	5.800.000.000	10	6.960.000.000	10	8.352.000.000	10	10.022.400.000	10	12.026.880.000	10	14.432.256.000	60	57.593.536.000	
			- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	800.000.000	100	960.000.000	100	1.152.000.000	100	1.382.400.000	100	1.658.880.000	100	1.990.656.000	100	7.943.936.000	
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	28	1.525.000.000	28	1.830.000.000	28	2.196.000.000	28	2.635.200.000	28	3.162.240.000	28	3.794.688.000	168	15.143.128.000	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	25.000.000	100	30.000.000	100	36.000.000	100	43.200.000	100	51.840.000	100	62.208.000	100	248.248.000	
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	

			- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	10	5.500.000.000	10	6.600.000.000	10	7.920.000.000	10	9.504.000.000	10	11.404.800.000	10	13.685.760.000	60	54.614.560.000	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	250.000.000	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	100	518.400.000	100	622.080.000	100	2.482.480.000	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat/Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat/Tak Bermotor	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	864.000.000	100	1.036.800.000	100	1.244.160.000	100	4.964.960.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	449.324.690.000	100	539.189.628.000	100	647.027.553.600	100	776.433.064.320	100	931.719.677.184	100	1.118.063.612.621	100	4.461.758.225.725	
			- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (%)	100	208.856.500.000	100	250.627.800.000	100	300.753.360.000	100	360.904.032.000	100	433.084.838.400	100	519.701.806.080	100	2.073.928.336.480	
			- Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SMA yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Baru	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	

			- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.600.000.000	5	4.320.000.000	5	5.184.000.000	5	6.220.800.000	30	24.824.800.000	
			- Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31	2.500.000.000	31	3.000.000.000	31	3.600.000.000	31	4.320.000.000	31	5.184.000.000	31	6.220.800.000	186	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	20	2.000.000.000	20	2.400.000.000	20	2.880.000.000	20	3.456.000.000	20	4.147.200.000	20	4.976.640.000	120	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20	2.000.000.000	20	2.400.000.000	20	2.880.000.000	20	3.456.000.000	20	4.147.200.000	20	4.976.640.000	120	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	31	2.000.000.000	31	2.400.000.000	31	2.880.000.000	31	3.456.000.000	31	4.147.200.000	31	4.976.640.000	186	19.859.840.000	
			- Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4	1.500.000.000	4	1.800.000.000	4	2.160.000.000	4	2.592.000.000	4	3.110.400.000	4	3.732.480.000	24	14.894.880.000	

			- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan RutinBangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMA yang Terpenuhi	14	1.500.000.000	14	1.800.000.000	14	2.160.000.000	14	2.592.000.000	14	3.110.400.000	14	3.732.480.000	84	14.894.880.000	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	31	500.000.000	31	600.000.000	31	720.000.000	31	864.000.000	31	1.036.800.000	31	1.244.160.000	186	4.964.960.000	
			- Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1	500.000.000	1	600.000.000	1	720.000.000	1	864.000.000	1	1.036.800.000	1	1.244.160.000	6	4.964.960.000	
			- Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiadeolahraga	500	500.000.000	500	600.000.000	500	720.000.000	500	864.000.000	500	1.036.800.000	500	1.244.160.000	3000	4.964.960.000	
			- Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik danTenaga kependidikan	611	500.000.000	611	600.000.000	611	720.000.000	611	864.000.000	611	1.036.800.000	611	1.244.160.000	3666	4.964.960.000	
			- Pengembangan KarirPendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Atas	31	500.000.000	31	600.000.000	31	720.000.000	31	864.000.000	31	1.036.800.000	31	1.244.160.000	186	4.964.960.000	
			- Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227	500.000.000	227	600.000.000	227	720.000.000	227	864.000.000	227	1.036.800.000	227	1.244.160.000	1362	4.964.960.000	
			- Pengelolaan DanaBOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227	108.856.500.000	227	130.627.800.000	227	156.753.360.000	227	188.104.032.000	227	225.724.838.400	227	270.869.806.080	1362	1.080.936.336.480	
			- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227	500.000.000	227	600.000.000	227	720.000.000	227	864.000.000	227	1.036.800.000	227	1.244.160.000	1362	4.964.960.000	
			- Pemeliharaan MebelSekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi	31	1.500.000.000	31	1.800.000.000	31	2.160.000.000	31	2.592.000.000	31	3.110.400.000	31	3.732.480.000	186	14.894.880.000	
			- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	100	164.102.190.000	100	196.922.628.000	100	236.307.153.600	100	283.568.584.320	100	340.282.301.184	100	408.338.761.421	100	1.629.521.618.525	
			- Pembangunan USB(Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	25	7.464.960.000	150	29.789.760.000	
			- Penambahan RuangKelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan RuangPraktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan RuangLaboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan RuangUnit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- PembangunanPerpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	

			- Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	25	2.000.000.000	25	2.400.000.000	25	2.880.000.000	25	3.456.000.000	25	4.147.200.000	25	4.976.640.000	150	19.859.840.000	
			- Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang Terpenuhinya Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu (Pemenuhan SPM)	5400	1.500.000.000	5400	1.800.000.000	5400	2.160.000.000	5400	2.592.000.000	5400	3.110.400.000	5400	3.732.480.000	32400	14.894.880.000	

			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	25	500.000.000	25	600.000.000	25	720.000.000	25	864.000.000	25	1.036.800.000	25	1.244.160.000	150	4.964.960.000	
			- Penyajian danTindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	25	500.000.000	25	600.000.000	25	720.000.000	25	864.000.000	25	1.036.800.000	25	1.244.160.000	150	4.964.960.000	
			- Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi di bidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035	500.000.000	2035	600.000.000	2035	720.000.000	2035	864.000.000	2035	1.036.800.000	2035	1.244.160.000	12210	4.964.960.000	
			- Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611	500.000.000	611	600.000.000	611	720.000.000	611	864.000.000	611	1.036.800.000	611	1.244.160.000	3666	4.964.960.000	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304	500.000.000	304	600.000.000	304	720.000.000	304	864.000.000	304	1.036.800.000	304	1.244.160.000	1824	4.964.960.000	
			- PembangunanBengkel/Unit Produksi	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	25	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	3.600.000.000	25	4.320.000.000	25	5.184.000.000	25	6.220.800.000	150	24.824.800.000	
			- Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	500.000.000	185	600.000.000	185	720.000.000	185	864.000.000	185	1.036.800.000	185	1.244.160.000	1110	4.964.960.000	
			- Pengelolaan DanaBOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185	78.802.190.000	185	94.562.628.000	185	113.475.153.600	185	136.170.184.320	185	163.404.221.184	185	196.085.065.421	1110	782.499.442.525	
			- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185	300.000.000	185	360.000.000	185	432.000.000	185	518.400.000	185	622.080.000	185	746.496.000	1110	2.978.976.000	
			- Pemeliharaan MebelSekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah	25	1.500.000.000	25	1.800.000.000	25	2.160.000.000	25	2.592.000.000	25	3.110.400.000	25	3.732.480.000	150	14.894.880.000	
			- Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100	76.366.000.000	100	91.639.200.000	100	109.967.040.000	100	131.960.448.000	100	158.352.537.600	100	190.023.045.120	100	758.308.270.720	
			- Pembangunan UnitSekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit SekolahBaru (USB)	30	2.500.000.000	30	3.000.000.000	30	3.600.000.000	30	4.320.000.000	30	5.184.000.000	30	6.220.800.000	180	24.824.800.000	
			- Penambahan RuangKelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangUnit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit KesehatanSekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- PembangunanPerpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangSerba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- PembangunanAsrama Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- PembangunanFasilitas Parkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan KantinSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas KepalaSekolah, Guru, Penjaga Sekolah	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangLaboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Orientasi danMobilitas	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangBina Persepsi Bunyi dan Irama untukTunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu(B)	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	

			- Pembangunan RuangBina Diri untuk Tunagrahita ©	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangBina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Pembangunan RuangBina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	30	2.000.000.000	30	2.400.000.000	30	2.880.000.000	30	3.456.000.000	30	4.147.200.000	30	4.976.640.000	180	19.859.840.000	
			- Rehabilitasi RuangKelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangUnit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangSerba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi AsramaSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi FasilitasParkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi KantinSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangLaboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak BerkebutuhanKhusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangOrientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu(B)	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangBina Diri untuk Tunagrahita ©	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangBina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Rehabilitasi RuangBina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	30	1.500.000.000	30	1.800.000.000	30	2.160.000.000	30	2.592.000.000	30	3.110.400.000	30	3.732.480.000	180	14.894.880.000	
			- Pengadaan MebelSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan AlatRumah Tangga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan SaranaMobilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pemeliharaan RutinBangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pemeliharaan RutinSarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	



			- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SLB		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos		30	2.266.000.000	30	2.719.200.000	30	3.263.040.000	30	3.915.648.000	30	4.698.777.600	30	5.638.533.120	180	22.501.198.720	
			- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos		30	300.000.000	30	360.000.000	30	432.000.000	30	518.400.000	30	622.080.000	30	746.496.000	180	2.978.976.000	
			- Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah		30	1.000.000.000	30	1.200.000.000	30	1.440.000.000	30	1.728.000.000	30	2.073.600.000	30	2.488.320.000	180	9.929.920.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan jenjang Pendidikan Khusus		100	2.000.000.000	100	2.400.000.000	100	2.880.000.000	100	3.456.000.000	100	4.147.200.000	100	4.976.640.000	100	19.859.840.000	
			- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	1.000.000.000	2	1.200.000.000	2	1.440.000.000	2	1.728.000.000	2	2.073.600.000	2	2.488.320.000	12	9.929.920.000	
			- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	1.000.000.000	2	1.200.000.000	2	1.440.000.000	2	1.728.000.000	2	2.073.600.000	2	2.488.320.000	12	9.929.920.000	
			- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	
			- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	250.000.000	2	300.000.000	2	360.000.000	2	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	12	2.482.480.000	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304	95.000.000	304	114.000.000	304	136.800.000	304	164.160.000	304	196.992.000	304	236.390.400	1824	943.342.400	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	95.000.000	185	114.000.000	185	136.800.000	185	164.160.000	185	196.992.000	185	236.390.400	1110	943.342.400	
			- Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 9 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100	475.000.000	100	570.000.000	100	684.000.000	100	820.800.000	100	984.960.000	100	1.181.952.000	100	4.716.712.000	
			- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30	95.000.000	30	114.000.000	30	136.800.000	30	164.160.000	30	196.992.000	30	236.390.400	180	943.342.400	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330	95.000.000	330	114.000.000	330	136.800.000	330	164.160.000	330	196.992.000	330	236.390.400	1980	943.342.400	
			- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94	95.000.000	94	114.000.000	94	136.800.000	94	164.160.000	94	196.992.000	94	236.390.400	564	943.342.400	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94	95.000.000	94	114.000.000	94	136.800.000	94	164.160.000	94	196.992.000	94	236.390.400	564	943.342.400	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30	95.000.000	30	114.000.000	30	136.800.000	30	164.160.000	30	196.992.000	30	236.390.400	180	943.342.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	5.100.000.000	100	6.120.000.000	100	7.344.000.000	100	8.812.800.000	100	10.575.360.000	100	12.690.432.000	100	50.642.592.000	
			- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I	3	510.000.000	3	612.000.000	3	734.400.000	3	881.280.000	3	1.057.536.000	3	1.269.043.200	18	5.064.259.200	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan Di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I	3	425.000.000	3	510.000.000	3	612.000.000	3	734.400.000	3	881.280.000	3	1.057.536.000	18	4.220.216.000	
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	
			- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.400.000	100	146.880.000	100	176.256.000	100	211.507.200	600	844.043.200	

			- Rehabilitasi RuangBina Diri untuk Tunagrahita ©	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	30	1,500,000,000	30	1,800,000,000	30	2,160,000,000	30	2,592,000,000	30	3,110,400,000	30	3,732,480,000	180	14,894,880,000	
			- Rehabilitasi RuangBina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	30	1,500,000,000	30	1,800,000,000	30	2,160,000,000	30	2,592,000,000	30	3,110,400,000	30	3,732,480,000	180	14,894,880,000	
			- Rehabilitasi RuangBina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €	30	1,500,000,000	30	1,800,000,000	30	2,160,000,000	30	2,592,000,000	30	3,110,400,000	30	3,732,480,000	180	14,894,880,000	
			- Pengadaan MebelSekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan AlatRumah Tangga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan SaranaMobilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pemeliharaan RutinBangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pemeliharaan RutinSarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah DinasKepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Penyediaan BiayaPersonil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Siswa	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SLB	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Penyiapan danTindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen EvaluasiSatuan Pendidikan Khusus	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga,sains, dan seni	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Penyediaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Pengembangan KarirPendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Pengelolaan DanaBOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khususyang tersalurkan Dana Bos	30	2,266,000,000	30	2,719,200,000	30	3,263,040,000	30	3,915,648,000	30	4,698,777,600	30	5,638,533,120	180	22,501,198,720	
			- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30	300,000,000	30	360,000,000	30	432,000,000	30	518,400,000	30	622,080,000	30	746,496,000	180	2,978,976,000	
			- Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah	30	1,000,000,000	30	1,200,000,000	30	1,440,000,000	30	1,728,000,000	30	2,073,600,000	30	2,488,320,000	180	9,929,920,000	

			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	2,000,000,000	100	2,400,000,000	100	2,880,000,000	100	3,456,000,000	100	4,147,200,000	100	4,976,640,000	100	19,859,840,000	
			- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2	1,000,000,000	2	1,200,000,000	2	1,440,000,000	2	1,728,000,000	2	2,073,600,000	2	2,488,320,000	12	9,929,920,000	
			- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	1,000,000,000	2	1,200,000,000	2	1,440,000,000	2	1,728,000,000	2	2,073,600,000	2	2,488,320,000	12	9,929,920,000	
			- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (%)	100	500,000,000	100	600,000,000	100	720,000,000	100	864,000,000	100	1,036,800,000	100	1,244,160,000	100	4,964,960,000	
			- Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas	Jumlah Dokumen Pemetaan distribusi PTK	2	500,000,000	2	600,000,000	2	720,000,000	2	864,000,000	2	1,036,800,000	2	1,244,160,000	12	4,964,960,000	
			- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	250,000,000	2	300,000,000	2	360,000,000	2	432,000,000	2	518,400,000	2	622,080,000	12	2,482,480,000	
			Cabang Dinas Wilayah I s.d VI																
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I	100	1,520,000,000	100	1,824,000,000	100	2,188,800,000	100	2,626,560,000	100	3,151,872,000	100	3,782,246,400	100	15,093,478,400	
			- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100	475,000,000	100	570,000,000	100	684,000,000	100	820,800,000	100	984,960,000	100	1,181,952,000	100	4,716,712,000	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	227	95,000,000	227	114,000,000	227	136,800,000	227	164,160,000	227	196,992,000	227	236,390,400	1362	943,342,400	

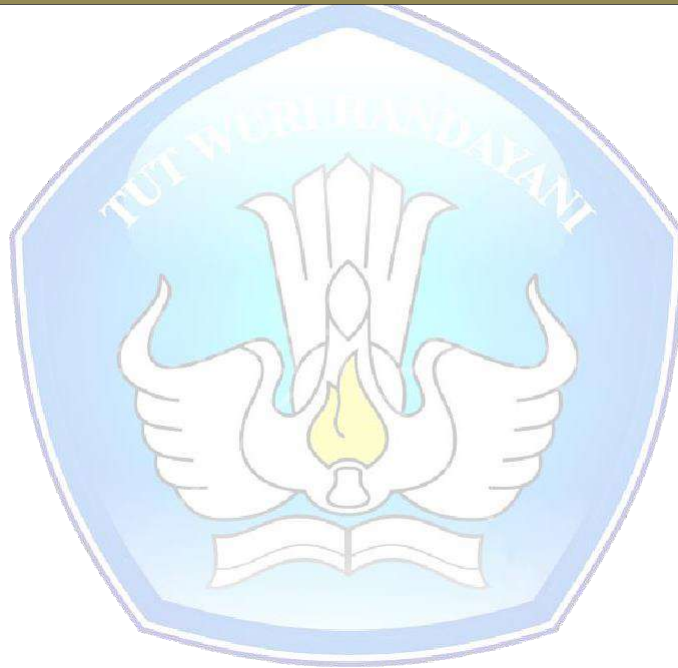
			- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		227	95,000,000	227	114,000,000	227	136,800,000	227	164,160,000	227	196,992,000	227	236,390,400	1362	943,342,400	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi di bidang sains, dan seni olimpiade, olahraga		2497	95,000,000	2497	114,000,000	2497	136,800,000	2497	164,160,000	2497	196,992,000	2497	236,390,400	14982	943,342,400	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		611	95,000,000	611	114,000,000	611	136,800,000	611	164,160,000	611	196,992,000	611	236,390,400	3666	943,342,400	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		227	95,000,000	227	114,000,000	227	136,800,000	227	164,160,000	227	196,992,000	227	236,390,400	1362	943,342,400	
			- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah 1 (%)		100	570,000,000	100	684,000,000	100	820,800,000	100	984,960,000	100	1,181,952,000	100	1,418,342,400	100	5,660,054,400	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK		185	95,000,000	185	114,000,000	185	136,800,000	185	164,160,000	185	196,992,000	185	236,390,400	1110	943,342,400	
			- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		185	95,000,000	185	114,000,000	185	136,800,000	185	164,160,000	185	196,992,000	185	236,390,400	1110	943,342,400	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi di bidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni		2035	95,000,000	2035	114,000,000	2035	136,800,000	2035	164,160,000	2035	196,992,000	2035	236,390,400	12210	943,342,400	
			- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan		611	95,000,000	611	114,000,000	611	136,800,000	611	164,160,000	611	196,992,000	611	236,390,400	3666	943,342,400	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK		304	95,000,000	304	114,000,000	304	136,800,000	304	164,160,000	304	196,992,000	304	236,390,400	1824	943,342,400	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan		185	95,000,000	185	114,000,000	185	136,800,000	185	164,160,000	185	196,992,000	185	236,390,400	1110	943,342,400	
			- Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah 1 (%)		100	475,000,000	100	570,000,000	100	684,000,000	100	820,800,000	100	984,960,000	100	1,181,952,000	100	4,716,712,000	
			- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		30	95,000,000	30	114,000,000	30	136,800,000	30	164,160,000	30	196,992,000	30	236,390,400	180	943,342,400	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi di bidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni		330	95,000,000	330	114,000,000	330	136,800,000	330	164,160,000	330	196,992,000	330	236,390,400	1980	943,342,400	
			- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB		94	95,000,000	94	114,000,000	94	136,800,000	94	164,160,000	94	196,992,000	94	236,390,400	564	943,342,400	
			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB		94	95,000,000	94	114,000,000	94	136,800,000	94	164,160,000	94	196,992,000	94	236,390,400	564	943,342,400	
			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus		30	95,000,000	30	114,000,000	30	136,800,000	30	164,160,000	30	196,992,000	30	236,390,400	180	943,342,400	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada Kantor Cabang Dinas Wilayah I	100	5,100,000,000	100	6,120,000,000	100	7,344,000,000	100	8,812,800,000	100	10,575,360,000	100	12,690,432,000	100	50,642,592,000	
			- <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I</i>	3	510,000,000	3	612,000,000	3	734,400,000	3	881,280,000	3	1,057,536,000	3	1,269,043,200	18	5,064,259,200	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Keuangan Di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I</i>	3	425,000,000	3	510,000,000	3	612,000,000	3	734,400,000	3	881,280,000	3	1,057,536,000	18	4,220,216,000	
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I</i>	1	935,000,000	1	1,122,000,000	1	1,346,400,000	1	1,615,680,000	1	1,938,816,000	1	2,326,579,200	6	9,284,475,200	
			- Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pemulangan Pegawai yang Penun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Penun	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	

			- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I		12	935,000,000	12	1,122,000,000	12	1,346,400,000	12	1,615,680,000	12	1,938,816,000	12	2,326,579,200	72	9,284,475,200	
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I		10	935,000,000	10	1,122,000,000	10	1,346,400,000	10	1,615,680,000	10	1,938,816,000	10	2,326,579,200	60	9,284,475,200	
			- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Cabang Dinas Wilayah I		28	340,000,000	28	408,000,000	28	489,600,000	28	587,520,000	28	705,024,000	28	846,028,800	168	3,376,172,800	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,400,000	100	146,880,000	100	176,256,000	100	211,507,200	600	844,043,200	

146

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



7

Pada bagian ini akan disajikan Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir periode Rencana Strategis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan bidang pendidikan setiap tahun (benchmark) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai

Indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021 -2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah dengan rumus atau perhitungan sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Persentase Nilai Indikator HLS ditambah Nilai Indikator RLS

2. Nilai Mutu Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Persentase Jumlah Target Capaian Indikator Pelaksanaan berdasarkan Hasil Evaluasi Asesment Nasional pada Raport Pendidikan

$$\frac{\text{JUMLAH NILAI INDIKATOR (1)+(2)+(3)+(4)+(5)}}{\text{JUMLAH INDIKATOR HASIL EVALUASI RAPOR PENDIDIKAN SMA}}$$

3. Nilai Mutu Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Persentase Jumlah Jumlah Penduduka Berusia 16-18 Tahun yang masih aktif bersekolah dibagi jumlah Penduduk usia 16-18 Tahun

$$\frac{\text{JUMLAH SISWA SMA/SMK/SLB USIA 16-18}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18}} \times 100\%$$

4. Angka Partisipasi Kasar

Formulasi Perhitungan : Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah

APK SMA / SMK / SLB	=	$\frac{\text{JUMLAH SISWA SMA / SMK / SLB}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}}$	x	100%
---------------------	---	--	---	------

2. Angka Partisipasi Murni

Formulasi Perhitungan : Persentase jumlah siswa di usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah

APM SMA / SMK / SLB	=	$\frac{\text{Jumlah siswa ditingkat SMA/SMK/SLB}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}}$	x	100%
---------------------	---	--	---	------

3. Angka Putus Sekolah

Formulasi Perhitungan : Kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu

APTS (16-18)	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 yang sedang tidak sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 - 12 th}}$
--------------	---	---

4. Angka Kelulusan (AL)

Formulasi Perhitungan : Kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu

APTS (16-18)	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 yang sedang tidak sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 - 12 th}}$
--------------	---	---

5. Persentase SMA berakreditasi minimal B

Formulasi Perhitungan : Persentase Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B

% Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B	=	$\frac{\text{Jumlah Kepala Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B}}{\text{jumlah Kepala Paket Keahlian Berakreditasi seluruhnya}}$	x	100%
--	---	--	---	------

6. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah

Formulasi Perhitungan : Perbandingan sekolah Jenjang pendidikan

terhadap penduduk usia Jenjang pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/SMLB) per 10000 penduduk	=	jumlah sekolah SMA/MA/SMK/SMLB
		10000 murid usia jenjang pendidikan menengah

7. Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B

Formulasi Perhitungan : Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B

% Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B	=	Jumlah Kepala Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B	x	100%
		jumlah Kepala Paket Keahlian Berakreditasi seluruhnya		

8. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah

Formulasi Perhitungan : Perbandingan sekolah Jenjang pendidikan terhadap penduduk usia Jenjang pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/SMLB) per 10000 penduduk	=	jumlah sekolah SMA/MA/SMK/SMLB
		10000 murid usia jenjang pendidikan menengah

9. Persentase guru di SMA/SMK/SLB bersertifikasi

Formulasi Perhitungan : Persentase Jumlah guru SMA/SMK/SLB

% Jumlah Guru SMA/SMK/SLB=	=	Jumlah guru SMA Bersertifikasi	x	100%
		jumlah guru SMA seluruhnya		

10. Persentase guru di SMA/SMK/SLB berkualifikasi S2

Formulasi Perhitungan : Perbandingan guru jenjang pendidikan S2 terhadap Jumlah keseluruhan Guru PNS jenjang Sekolah Menengah

% Guru SMA (S2) =	=	Jumlah Guru PNS jenjang SMA yang berijazah kualifikasi S2	X	100%
		Jumlah seluruh Guru PNS jenjang SMA		

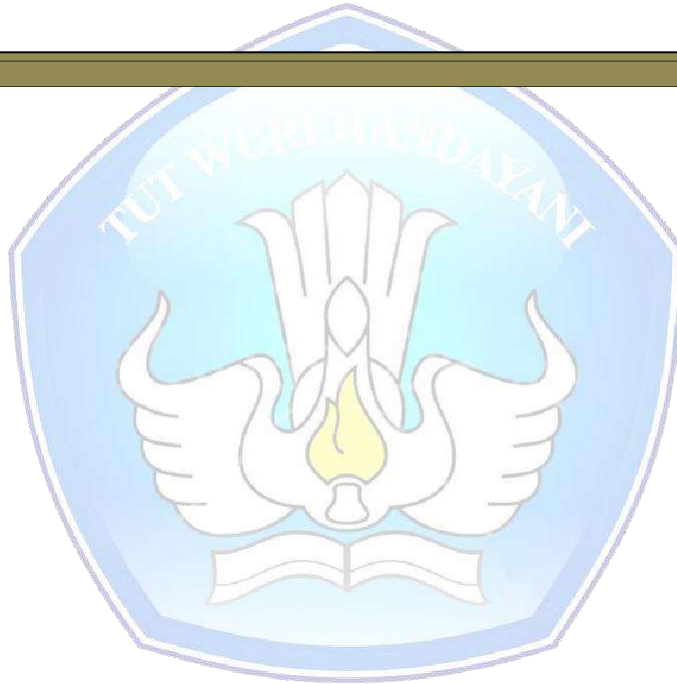
Penetapan indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 -2026 diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDIDIKAN							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70,05	70,05
2	Indeks Pendidikan	69.65	73.61	77.01	81.48	84.88	91.94	91.94
3	Nilai Mutu Pendidikan SMA		55,73	54,02	54,03	54,04	54,05	54,05
4	Nilai Mutu Pendidikan SMK		50,83	50,39	50,40	50,41	50,42	50,42
5	Nilai Mutu Pendidikan SLB		46,46	53,84	53,85	53,86	53,87	53,87
6	Nilai APS Usia 16-18		76,32	75,84	75,85	75,86	75,87	75,87
7	Angka Harapan Lama Sekolah	13.23	13.32	13.50	13.60	13.75	14.00	14.00
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.89	8.89	9.00	9.25	9.50	10.00	10.00
9	APK SMA	75.19	82.96	83.10	83.50	84.00	84.00	84.00
10	APM SMA	68.50	69.00	69.50	70.00	70.50	71.00	71.00
11	Angka Kelulusan (AL) SMA	97.75	98.00	98.25	98.40	98.60	98.75	98.75
12	Angka Putus Sekolah SMA	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	1.00
13	Persentase SMA berakreditasi minimal B	46.26	52.27	53.50	54.50	55.00	57.00	57.00
14	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	62.25	62.50	62.75	70.00	70.25	70.50	70.50
15	APK SMK	73.19	80.96	81.10	81.50	82.00	83.00	83.00
16	APM SMK	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50	69.00	69.00
17	Angka Kelulusan (AL) SMK	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00	99.00
18	Angka Putus Sekolah SMK	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	1.00
19	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,91	48.97	49.00	50.00	51.00	52.00	52.00

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENDIDIKAN							
20	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50	70.50
21	APM SLB/Paket C	71.19	78.96	78.10	78.50	79.00	79.00	79.00
22	APK SLB/Paket C	64.50	65.00	65.50	66.00	66.50	67.00	67.00
23	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	34	32	33	34	35	36	36
24	Persentase guru di SMA bersertifikasi	35.90	37.00	39.50	40.00	43.50	45.00	45.00
25	Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	99.01	99.10	99.25	99.50	99.75	99.80	99.80
26	Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
27	Persentase guru di SMK bersertifikasi	34.80	36.00	40.00	43.00	45.50	47.20	47.20
28	Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	97.04	98.00	98.50	99.00	99.20	99.50	99.50
29	Persentase guru di SMK berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
30	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	50.00	60.00	70.00	70.50	80.00	85.00	85.00
31	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	50.00	60.00	70.00	70.50	80.00	85.00	85.00

PENUTUP



8

Demikian rencana strategis (Renstra-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ini di susun sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang di rancang sebagai upaya untuk menawarkan Program.

Rencana Strategis (Renstra-OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara detail diuraikan dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan dan strategi yang akan dicapai serta implementasi pelaksanaan program dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud.

Selanjutnya penyusunan Renstra-OPD Perubahan ini pada dasarnya sangat bermakna bagi Rencana Tindakan pelaksanaan tugas dan fungsi secara sistematis, transparan dan Akuntabel, terstruktur sehingga dapat mengevaluasi dan mengoreksi beban tugas dan fungsi yang belum maksimal. Disamping itu patokan kinerja yang diharapkan dengan mudah dapat diklasifikasikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan untuk masa akan datang.

Semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 -2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing,**Amien....**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196707121990032013